

POTRET KEBERPIHAKAN ANGGARAN DAERAH DALAM DEFORESTASI DAN DEGRADASI LAHAN

PENULIS

HASYMI RINALDI
KHAIRUL SANI
ABU MAS'UD

EDITOR

FAISAL RIZA



The Asia Foundation



Potret Keberpihakan Anggaran Daerah dalam Penanganan Deforestasi dan Degradasi Lahan

Judul buku

**Potret Keberpihakan Anggaran Daerah dalam
Penanganan Deforestasi dan Degradasi Lahan**

Editor

Faisal Riza

Penulis

Hasymi Rinaldi

Khairul Sani

Abu Mas'ud

xxxx + xxxx halaman; 14,8 x 21,0 cm

ISBN: 978-602-70251-1-0

Diterbitkan oleh

JARI Indonesia Borneo Barat

Jl. Parit H. Husin II, Komplek Permata Paris No. A10

Pontianak, Kalimantan Barat, 78116

Website: jariborneo.org

Email: jariborbar@yahoo.com

Didukung oleh

The Asia Foundation, UKAID



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	1
DAFTAR GRAFIK.	3
DAFTAR TABEL.	4
KATA PENGANTAR	5
I. Deforestasi dan Degradasi Lahan Penyumbang Terbesar Emisi GRK.	1
Pendahuluan	1
II. Tantangan Perubahan Iklim disektor Kehutanan dan Lahan Gambut: Rasionalisasi Penyusunan Baseline 3	
Perubahan Tutupan Lahan.	3
Tumbuh Pesatnya Perkebunan Kelapa Sawit	6
Perubahan Fungsi Kawasan Hutan	9
Ancaman Kebakaran Hutan	11
III. AKSI DAERAH DALAM PENURUNAN EMISI. . .	12
Pemantapan Kawasan Konservasi dan Hutan Lindung 13	
Kemampuan Mempertahankan Tutupan Hutan pada Kawasan Konservasi dan Hutan Lindung	14
Kemampuan dalam Penanganan Deforestasi pada Kawasan Konservasi dan Hutan Lindung	16
Alokasi Belanja Pemantapan Kawasan Konservasi dan Hutan Lindung	19
Rehabilitasi Hutan dan Pemberdayaan Masyarakat	21
Restorasi 35 ribu hektar lahan kering sekunder melalui	

skema HTR	21
Alokasi Belanja Pembangunan HTR	23
Mempertimbangkan Keberadaan Hutan Desa dan Hutan Kemasyarakatan	25
Alokasi Belanja Hutan Desa	26
Alokasi Belanja Hutan Kemasyarakatan	27
Pemantapan Kawasan HTI	28
Alokasi Belanja Pemantapan HTI	29
Pengendalian Aktivitas Ilegal	31
Alokasi Belanja untuk Pengendalian Aktivitas Ilegal	32
Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	33
Alokasi Belanja Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	34
IV. Ancaman Pencapaian Target Penurunan Emisi GRK	37
Perubahan Tutupan Lahan	37
Pertumbuhan Perkebunan Kelapa Sawit	38
V. Potret Anggaran Hijau: Dukungan Belanja Kabupaten 2016 dalam Aksi Daerah	41
Kabupaten Sintang	42
Tagging Anggaran Hijau Kabupaten Sintang	44
Kabupaten Kapuas Hulu	47
Tagging Anggaran Hijau Kabupaten Kapuas Hulu .	48
Daftar Pustaka	1
Daftar Istilah	2

V. Penutup	3
----------------------	---

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Target Penurunan Emisi GRK menurut Perpres No. 61/2011 (Gg CO ₂ -eq).....	2
Grafik 2. Target Penurunan Emisi GRK menurut Pergub No. 27 tahun 2012 (ton CO ₂ -eq).....	2
Grafik 3. Deforestasi Kalimantan Barat 2009-2011 (Ha/Thn)	4
Grafik 4. Perubahan Tutupan Lahan 2006-2011 (dalam ribu hektar) dan Carbon Stock (ton/ha) pada tiap tutupan.....	5
Grafik 5. Realisasi Perkebunan 2006-2012 (dalam ribu hektar)	8
Grafik 6. Selisih Proyeksi dan Realisasi Luasan Perkebunan ditahun 2012	9
Grafik 7. Persentase terhadap Luas Daratan Akibat Perubahan Status Kawasan	10
Grafik 8. Deforestasi per Status Kawasan	10
Grafik 9. Kebakaran Hutan dan Lahan Gambut 2007-2010 (dalam hektar)	11
Grafik 10. Perkiraan Emisi GRK 2006-2020	12
Grafik 11. Perubahan Tutupan Lahan pada Kawasan Konservasi dan Hutan Lindung 2014-2015 (dalam ribu hektar)	15
Tabel 5. Rerata Above Ground C Stock (ton/ha) berdasarkan Tutupan Lahan	15

Grafik 12. Perubahan Above Ground C Stock (Gigaton CO ₂ -eq).....	16
Grafik 13. Laju Deforestasi 2014-2015 (ha/thn) ..	17
Grafik 14. Deforestasi terhadap Ketersediaan Hutan (Primer dan Sekunder) di Kawasan Konservasi dan Hutan Lindung	18
Grafik 15. Komposisi Belanja untuk Pemantapan Kawasan Konservasi dan Hutan Lindung	20
Grafik 16. Rasio Belanja Untuk Kawasan Konservasi dan Hutan Lindung terhadap Belanja Langsung	21
Grafik 17. Luas Pencadangan HTR hingga 2010 ..	22
Grafik 18. Target dan Realisasi HTR.....	22
Grafik 19. Alokasi Belanja Fasilitas HTR 2012-2016 pada Dinas Kehutanan Prov. Kalbar	24
Grafik 20. Luas Pencadangan dan Izin Kelola Perhutanan Sosial 2016	25
Grafik 21. Perbandingan Total Belanja Langsung dengan Fasilitas Hutan Desa.....	26
Grafik 22. Perbandingan antara PAK dan IUPHKm...	27
Grafik 23. Perbandingan Total Belanja Langsung dengan Fasilitas Hutan Masyarakat	28
Grafik 24. Deforestasi pada kawasan IUPHHK-HTI 2014-2015.....	29
Sumber olahan Deforestasi 2014-2015, DIPSH, KLHK 2017.....	29
Grafik 25. Alokasi Belanja 2014-2015 untuk	

Pemantapan HTI	30
Grafik 26. Alokasi Belanja 2014-2015 untuk Pengendalian Aktivitas Ilegal	33
Grafik 27. Luas Kebakaran Hutan 2007-2016	34
Grafik 28. Alokasi Belanja Dalkarhutla 2013-2016	35
Grafik 29. Perubahan Alokasi Belanja terhadap Luas Kebakaran Hutan.....	36
Grafik 30. Persentase Alokasi Belanja Dalkarhutla terhadap Belanja Langsung	37
Grafik 31. Perubahan Tutupan Lahan 2006-2011 & 2011-2015	38
Grafik 32. Laju Pertumbuhan Luas Perkebunan Kelapa Sawit dan Karet (2012-2016).....	39
Grafik 33. Komposisi Kepemilikan Lahan Perkebunan Kelapa Sawit dan Karet	40
Grafik 34. Rerata PDRB atas Harga Berlaku Kab. Sintang 2012-2016	42
Grafik 35. Luas Perkebunan per Jenis	43
Grafik 36. Pola Pengembangan Perkebunan Sawit dan Karet	44
Grafik 37. Fiscal Gap vs Belanja Kehutanan dan Lingkungan Hidup	45
Grafik 38. DBH vs Belanja Kehutanan	45
Grafik 39. Rerata PDRB atas Harga Berlaku Kab. Kapuas Hulu 2013-2016.....	47
Grafik 40. Rasio Peruntukkan Lahan Kelapa Sawit dan Karet tahun 2015.....	48

Grafik 41. Fiscal Gap vs Belanja Lingkungan Hidup dan Pertanian	48
---	----

Grafik 42. DBH Kehutanan vs Belanja BLHD	49
--	----

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunianya sehingga Buku Potret Keberpihakan Anggaran Daerah Dalam Penanganan Deforestasi dan Degradasi Lahan telah dapat diselesaikan. Buku ini merupakan hasil dari analisa yang sudah dirampungkan dan terus dipelajari dalam beberapa bulan. Terutama dalam melihat arah kebijakan dari pemerintah daerah serta komitmennya untuk mengatasi permasalahan deforestasi dan degradasi lahan di Kalimantan Barat.

Terima kasih disampaikan kepada seluruh pengurus JARI Indonesia Borneo Barat yang telah berjuang dalam menerbitkan buku ini serta dukungan dari berbagai pihak. Seluruh stake holder pemerintah yang telah memberi sumbangsih dan kontribusinya. Dan semua pihak yang telah ikut membantu dalam penyelesaian buku ini.

Kami menyadari masih terdapat kekurangan dalam buku ini untuk itu kritik dan saran terhadap penyempurnaan buku ini sangat diharapkan. Semoga buku ini dapat memberi manfaat kita semua dan bagi semua pihak yang membutuhkan.

Pontianak, Desember 2017

Sekretaris Wilayah JARI Indonesia
Borneo Barat

Yudith Evametha Vitranilla,S.H.

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Cadangan Karbon Atas Tanah (ton/ha) berdasarkan Jenis Tutupan Lahan.....5

Tabel 2. Pelepasan Kawasan Hutan untuk Perkebunan 2006-20117

Tabel 3. Aksi Mitigasi Daerah Sub Sektor Kehutanan dan lahan Gambut..... 13

Tabel 4. Perubahan Status Kawasan terhadap Persentasi Target Pemantapan 14

Tabel 6. Komposisi Hutan pada Kawasan Konservasi dan Hutan Lindung 2015 17

Tabel 7. Persentase Deforestasi terhadap Ketersediaan Hutan pada Kawasan Konservasi dan Hutan Lindung 18

Tabel 8. Rata-Rata Luas IUPHHK HTR..... 24

Tabel 9. Deforestasi pada kawasan berizin dan non izin pada 2014-2015..... 31

Tabel 10. Perlindungan Kawasan Hutan dari Deforestasi 32

Tabel 11. Pembagian Kewenangan disektor Lahan .. 41

Tabel 12. Komposisi Belanja Langsung vs Tidak

Langsung.....46

Tabel 13. Tagging Anggaran Hijau Kab. Sintang
201646

(dalam juta rupiah)46

Tabel 14. Komposisi Belanja Langsung vs Tidak
Langsung.....49

Tabel 15. Tagging Anggaran Hijau Kab. Kapuas Hulu
201649

(dalam juta rupiah)49

I. DEFORESTASI DAN DEGRADASI LAHAN PENYUMBANG TERBESAR EMISI GRK

A. Pendahuluan

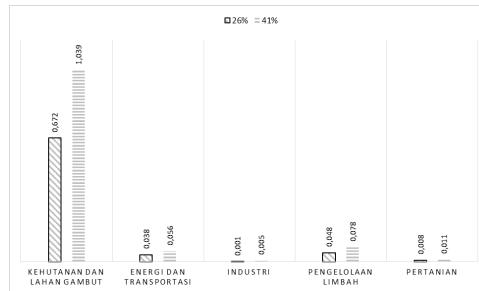
Melalui pergub No. 27 tahun 2012, daerah Kalimantan Barat mencanangkan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK). Hadirnya pergub tersebut merupakan mandat pemerintah melalui perpres No. 61 tahun 2011 dalam mengatasi permasalahan GRK ditingkat nasional. Terlepas dari mandat perpres tersebut, urgensi penanganan mengacu pada fakta bahwa Kalimantan Barat ditahun 2010 merupakan provinsi terbesar kedua di kalimantan yang memproduksi emisi CO₂-eq yakni sebanyak 3,5 juta ton CO₂-eq (Zacky, et al., 2014, hal. 40). Kalimantan Barat dengan Komitmen Penurunan Emisi Nasional pada Tahun 2020 dengan level penurunan emisi sebesar 26 persen (pengurangan secara mandiri), dari kuota emisinya ditargetkan menurunkan sebesar

61,4 juta ton, dan pada level 41 persen (jika mendapat bantuan asing) ditargetkan sebesar 96,5 juta ton (Pemprov Kalbar, 2012, hal. II-22).

Terdapat 6 bidang yang menjadi sasaran kegiatan RAD, yang dilengkapi dengan masing-masing Pokja, yaitu (1) Pertanian, (2) Kehutanan dan Lahan Gambut, (3) Industri, (4) Transportasi, (5) Energi, dan (6) Pengelolaan Limbah. Dari ke 6 sektor tersebut, sektor kehutanan memiliki kontribusi tertinggi dalam menyumbang CO₂-eq, sepanjang 2001-2006, sebesar 480 ribu CO₂-eq Gg/tahun (Purwanta, 2010, hal. 75). Angka tersebut memungkinkan lebih tinggi dari seharusnya mengingat model penghitungan mengeneralisir kemampuan hutan dalam menyerap karbon. Bahkan diperkirakan angka tersebut hanya sebesar 60% dari jumlah sesungguhnya.

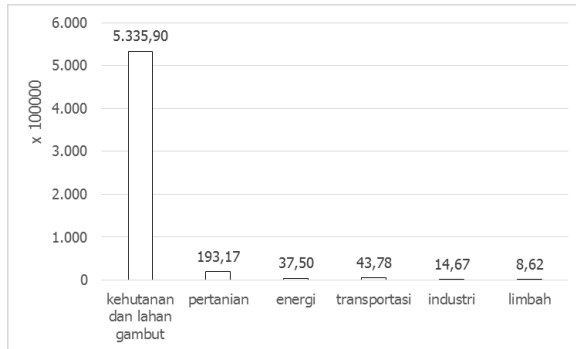
Tingginya kontribusi emisi GRK dari sektor kehutanan berakibat besarnya target penurunan emisi disektor tersebut. Jika mengacu pada Perpres No. 61 Tahun 2011 tentang RAN Penurunan Emisi GRK, target penurunan 26% yang akan dicapai adalah sebesar 0,672 Gigaton CO₂-eq. Sedangkan pada level 41%, target penurunan sebesar 1,039 Gigaton CO₂-eq Gg. Tingginya target penurunan tersebut, jika dibandingkan dengan target penurunan pada sektor lainnya, menunjukkan bahwa sektor kehutanan dan lahan gambut memiliki kontribusi terbesar dalam emisi GRK.

Grafik 1. Target Penurunan Emisi GRK menurut Perpres No.



Ditahun 2010, emisi GRK terbesar di Kalimantan Barat disumbangkan oleh sektor berbasis lahan, yaitu sebesar 98% (BAPPENAS, 2014, hal. 114). Bahkan ditahun 2020, tanpa adanya aksi mitigasi, sumbangsih sektor berbasis lahan diperkirakan mencapai 99,2%. Permasalahan utama adalah deforestasi dan degradasi lahan. Beberapa faktor pemicu deforestasi dan degradasi yaitu penebangan liar; kebakaran hutan; dan konversi lahan hutan untuk kegiatan-kegiatan lain yang menghasilkan penutupan lahan dengan cadangan karbon yang lebih rendah seperti untuk perkebunan dan pertanian, pemekaran wilayah (kabupaten), pertambangan dan pemukiman (Pemprov Kalbar, 2012, hal. II-31). Hasil pengamatan Tosiani (2015) sepanjang 2009-2014 menunjukkan bahwa adanya perubahan yang berbanding lurus antara emisi karbon dan laju deforestasi.

*Grafik 2. Target Penurunan Emisi GRK menurut Pergub No. 27
tahun 2012 (ton CO₂-eq)*



Besarnya emisi yang dikeluarkan pun diakibatkan bahwa sebagian besar tutupan lahan di Kalimantan Barat merupakan lahan gambut. Hasil perhitungan spasial menurut citra Landsat, luas gambut di Kalimantan Barat diperkirakan hampir 2 juta hektar (Pemprov Kalbar, 2012, hal. II-32). Keberadaan lahan gambut, berpotensi menghasilkan emisi lebih besar jika terjadi kebakaran dibandingkan dengan lahan kering. Karena selain terbakarnya vegetasi di permukaan, lapisan serasah dan material gambut juga ikut terbakar menghasilkan emisi karbon (CO₂) ke atmosfer (Maswar, 2012, p. 413). Tentunya, kebakaran dilahan gambut pun berakibat pada menurunnya cadangan karbon dikawasan tersebut. Permasalahan lain yang mengakibatkan penurunan kualitas gambut adalah alih fungsi hutan gambut menjadi HTI, Perkebunan Kelapa Sawit, dan drainase mengakibatkan penurunan kedalaman gambut (Pemprov Kalbar, 2012, hal. II-43).

II. TANTANGAN PERUBAHAN IKLIM DISEKTOR KEHUTANAN DAN LAHAN GAMBUT: RASIONALISASI PENYUSUNAN BASELINE

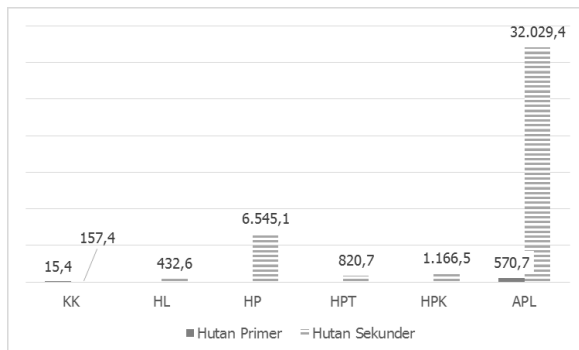
A. Perubahan Tutupan Lahan

RAD Penurunan Emisi GRK, sebagaimana yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, bukan tidak beralasan. Mandat RAN melalui perpres bukan satu-satunya alasan Pemda Kalbar untuk diharuskan sigap terhadap ancaman perubahan iklim. Beberapa hal yang mengakibatkan pentingnya aksi daerah, dilakukan dengan mempertimbangkan menurunnya kemampuan alam dalam penyerapan karbon.

Hal ini diakibatkan oleh tingginya laju deforestasi di Kalimantan Barat. Seperti yang ditampilkan pada grafik 3, menunjukkan bahwa deforestasi tertinggi berada pada hutan sekunder dan terjadi pada kawasan APL. Jika ditotalkan, angka deforestasi per tahun, disepanjang 2009-2011, dapat mencapai 41.7 ribu ha/thn. Rasio antara hutan dan non hutan di Kalimantan Barat

adalah 1:1,2 dimana luas hutan ditahun 2011 seluas 6,6 juta hektar (kawasan hutan primer, sekunder, dan hutan tanaman), dan 7,9 juta hektar untuk non hutan. Sedangkan komposisi antara hutan primer dan sekunder adalah 1:1,6.

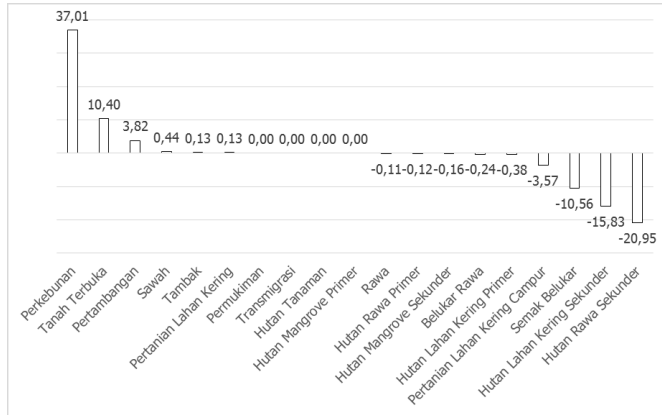
Grafik 3. Deforestasi Kalimantan Barat 2009-2011 (Ha/Thn)



Gambaran yang ditampilkan pada grafik 3 menunjukkan bahwa banyak kawasan berhutan, khususnya yang berkategori sebagai hutan sekunder, berada pada kawasan APL. Deforestasi yang berlangsung tersebut, tentunya berakibat pada perubahan tutupan lahan.

Sebelum diberlakukannya aksi mitigasi tingkat provinsi, terjadi perubahan tutupan lahan yang berpotensi pada tingginya pelepasan emisi karbon ke udara. Sepanjang tahun 2006-2011, lahan yang memiliki kemampuan dalam penyerapan karbon, mengalami penurunan drastis. Dan disaat bersamaan, berganti dengan lahan yang memiliki kemampuan rendah/tidak memiliki kemampuan dalam penyerapan karbon. Berkurangnya kemampuan lahan dalam penyerapan karbon berakibat langsung pada banyaknya karbon yang dilepaskannya ke udara, yang berakibat pada meningkatnya CO₂-eq.

Grafik 4. Perubahan Tutupan Lahan 2006-2011 (dalam ribu)



Pada grafik 3 dapat terlihat bahwa dalam kurun 5 tahun terjadi peningkatan luas lahan perkebunan dan tanah terbuka, dan disaat bersamaan terjadi pengurangan luas pada hutan primer dan sekunder. Ironisnya, perubahan lahan tersebut mengancam meningkatnya jumlah pelepasan CO₂-eq diakibatkan menurunnya kemampuan penyerapan karbon.

Tabel 1. Cadangan Karbon Atas Tanah (ton/ha) berdasarkan
Jenis Tutupan Lahan

Jenis Tutupan Lahan	c stock	Jenis Tutupan Lahan	c stock
Hutan Rawa Primer	196	Transmigrasi	10
Hutan Lahan Kering Primer	195,4	Pertanian Lahan Kering	8
Hutan Mangrove Primer	170	Pertanian Lahan Kering Campur	8
Hutan Lahan Kering Sekunder	169,7	Sawah	5

Hutan Rawa Sekunder	155	Permukiman	1
Hutan Mangrove Sekunder	120	Tanah Terbuka	0
Hutan Tanaman	64	Pertambangan	0
Perkebunan	63	Tambak	0
Belukar Rawa	15	Rawa	0
Semak Belukar	15		

Sumber. Dokumen RAD-GRK Hal II-41

Pada tabel 1, dapat terlihat jelas bahwa hutan primer dan sekunder (hutan rawa, hutan lahan kering, dan hutan mangrove) memiliki kemampuan menyimpan cadangan karbon tertinggi dibandingkan dengan jenis lainnya. Disepanjang tahun tersebut, terjadi penurunan secara signifikan tutupan hutan pada berbagai kategori. Disaat bersamaan, hilangnya tutupan hutan berganti dengan tingginya luas perkebunan, tanah terbuka, dan pertambangan.

Perubahan tersebut tentunya berdampak pada meningkatnya jumlah emisi yang dihasilkan. Semakin banyak hutan yang hilang, maka semakin sedikit karbon yang dapat diserap, dan semakin banyak CO₂-eq yang dilepaskan. Lebih dari 75% CO₂-eq dihasilkan oleh perubahan tutupan lahan (Carlson, et al., 2012). Hal ini mengacu pada kemampuan dari masing-masing tutupan lahan dalam menyimpan cadangan karbon. Seperti yang ditampilkan pada grafik 4, menunjukkan bahwa perubahan tutupan tersebut berakibat pada semakin menurunnya kemampuan lahan dalam menyerap karbon. 5 (lima) kategori tutupan lahan

yang memiliki kemampuan dalam menyimpan karbon tertinggi, yaitu (1) Hutan Lahan Kering Primer, (2) Hutan Rawa Primer, (3) Hutan Mangrove Primer, (4) Hutan Lahan Kering Sekunder, dan (5) Hutan Rawa Sekunder, dengan kemampuan menyerap karbon sebesar 155-196 ton/ha. Permasalahannya, kelima tutupan tersebut, disepanjang tahun tersebut mengalami penurunan. Diwaktu bersamaan, tutupan lahan dengan kemampuan penyerapan karbon rendah, justru mengalami perluasan. Kondisi ini berakibat berkurangnya kemampuan penyerapan sebesar 39,1 juta ton/ha ditahun 2011, terhitung sejak 2006. Jika menggunakan tabel 1 untuk melihat kemampuan penyerapan karbon atas tanah, maka disepanjang tahun tersebut terjadi kemampuan lahan dalam penyerapan karbon mengalami pengurangan sebesar kemampuan lahan dalam penyerapan karbon mengalami **pengurangan sebesar 39 gigaton¹**.

B. Tumbuh Pesatnya Perkebunan Kelapa Sawit

Kajian tentang pertumbuhan perkebunan, jika mengacu pada dokumen RAD-GRK, masuk dalam kategori pertanian. Permasalahannya, luasnya lahan yang digunakan pada sektor perkebunan berdampak langsung pada perubahan tutupan lahan. Carlson et.al (2012) menjelaskan bahwa sepanjang tahun 1990-2010, 90% lahan perkebunan sawit di kalimantan berada pada kawasan berhutan. Bahkan 47% diantaranya adalah hutan yang dalam keadaan utuh. Hasil

¹ Hasil diperoleh melalui total (luas tutupan lahan per jenis x cadangan karbon untuk tiap jenis tutupan lahan) ditahun 2011 dikurangi dengan total (luas tutupan lahan per jenis x cadangan karbon untuk tiap jenis tutupan lahan) ditahun 2006

riset Carlson et.al memperkirakan bahwa perkebunan sawit di Kalimantan bertanggung jawab terhadap 57% deforestasi disepanjang 2000-2010.

Bukan hanya hutan yang terancam akibat penanaman perkebunan sawit. Lahan gambut yang ditanami dengan sawit beresiko mengalami pengeringan. Kebutuhan terhadap pengeringan gambut untuk memperoleh kesuburan lahan. Celaknya, gambut yang dikeringkan melepaskan CO₂ keudara. Setiap hektare gambut tropis yang dikeringkan untuk pengembangan perkebunan mengeluarkan rata-rata 55 metrik ton CO₂ setiap tahun, kurang lebih setara dengan membakar lebih dari 6,000 galon bensin (Harris & Sargent, 2015).

Beranjak dari pertimbangan tersebut, maka kajian tentang pertumbuhan perkebunan kelapa sawit dimasukkan kedalam kategori kehutanan dan lahan gambut.

Mengacu hasil yang ditampilkan pada grafik 4 diatas, menunjukkan bahwa pertumbuhan tertinggi pada 2006-2011, adalah sektor perkebunan. Setidaknya, sejak 2007-2011, terhitung seluas 153,7 ribu hektar hutan dikawasan HPK diperuntukkan bagi kepentingan 11 industri perkebunan.

*Tabel 2. Pelepasan Kawasan Hutan untuk Perkebunan
2006-2011*

No	Nama Perusahaan	SK Pelepasan	Luas (Ha)
1	Surya Muykti Perkasa PT	SK.369/MENHUT-II/2007	12.939,11
2	Cipta Usaha Sejati PT	266/MNHUT-II/2008	13.239,38
3	Jalin Vaneo PT	SK.265/MENHUT-II/2008	18.075,33
4	Kayung Agro Lestari PT	SK.643/Menhut-II/2009	18.008,74
5	Patiware PT	SK.87/MENHUT-II/2009	6.623,54

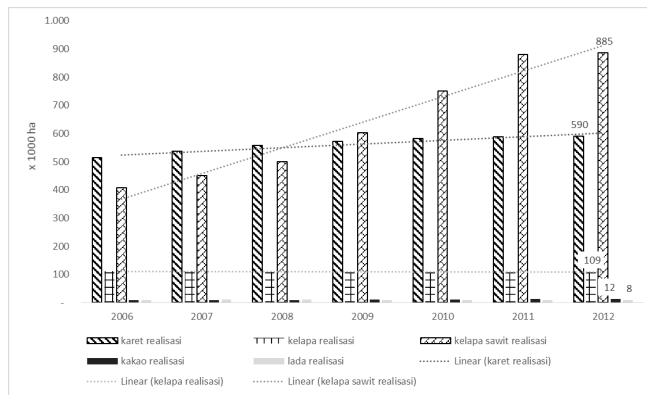
6	Citra Sawit Cemerlang PT	SK.344/Menhut-II/2011	15.664,86
7	Karya Makmur Langgeng PT	SK.689/Mrenhut-II/2011	18.474,97
8	Mitra karya Sentosa PT	SK.203/Menhut-II/2011	14.170,38
9	Mustika Agung Sentosa PT	SK.294/Menhut-II/2011	19.907,13
10	Pinang Witmas Abadi PT	SK.544/Menhut-II/2011	5.686,73
11	Sumatera Jaya Agro Lestari Blok I PT	SK.262/Menhut-II/2011	10.927,92
Total			153.718,09

Sumber. Buku Basis Data Spasial Kehutanan 2016

Padahal, jika melihat luas kawasan HPK berdasarkan SK Menhut No. 259/Kpts-II/2000, adalah seluas 514,4 ribu hektar. Sehingga, telah diperuntukkan sebesar 30% kawasan HPK pada 2006-2011 untuk perkebunan. Kondisi ini setidaknya memberikan gambaran tentang berkurangnya luas hutan di HPK. Ditahun 2011, seluas 46% (237 ribu hektar) kawasan HPK tidak lagi ditutupi hutan (baik kategori primer maupun sekunder).

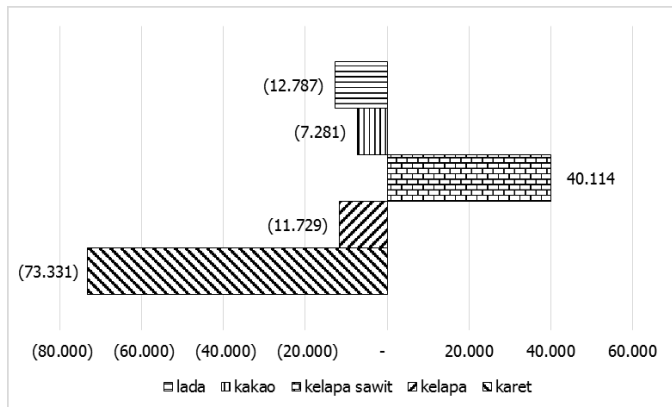
Menariknya, dari 5 komoditas perkebunan yang diunggulkan (karet, kelapa, kelapa sawit, kakao, dan lada), pertumbuhan kelapa sawit memiliki pertumbuhan yang cukup tinggi dibandingkan dengan komoditas lainnya.

Grafik 5. Realisasi Perkebunan 2006-2012 (dalam ribu hektar)



Pada grafik 6 dapat dilihat bahwa terjadi kesenjangan pertumbuhan pada sektor perkebunan. Trend yang ditunjukkan pada grafik tersebut menampilkan bahwa perkebunan kelapa sawit mendominasi sektor perkebunan lainnya, baik berdasarkan luas lahan yang diperuntukkan dan laju pertumbuhan pada masing-masing sektor perkebunan. Bahkan ditahun 2020, diproyeksikan pertumbuhan kelapa sawit dapat mencapai luas 1.250 ribu hektar. Proyeksi tersebut memungkinkan lebih tinggi, mengingat hasil perpaduan antara proyeksi dan realisasi ditahun 2012, pertumbuhan kelapa sawit melebihi luas yang diproyeksikan. Disaat bersamaan, sektor perkebunan lainnya ditahun 2012 justru mengalami penurunan dari luas yang diproyeksikan.

**Grafik 6. Selisih Proyeksi dan Realisasi Luasan Perkebunan
ditahun 2012**

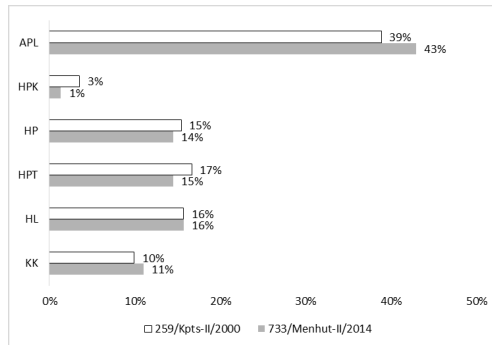


Pesatnya pertumbuhan kelapa sawit beresiko terhadap aksi penurunan emisi GRK. Hasil riset Carlson et.al (2012) melaporkan bahwa perkebunan kelapa sawit memiliki kontribusi yang signifikan dalam pelepasan CO₂-eq.

C. Perubahan Fungsi Kawasan Hutan

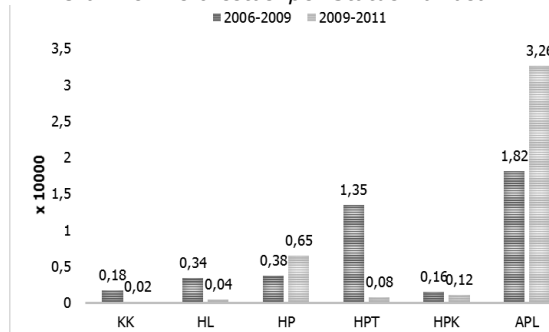
Permasalahan lain yang mengancam tingginya emisi GRK di Kalimantan Barat adalah perubahan status kawasan. Pada saat penyusunan dokumen RAD-GRK, status kawasan yang digunakan mengacu pada SK Menhut No. 259/Kpts-II/2000, dengan komposisi kawasan hutan seluas 61% dari luas daratan. Ditahun 2014, melalui terbitnya SK Menhut 733/ Menhut-II/2014, terjadi perubahan status kawasan yang berakibat luas kawasan hutan mengalami pengurangan, yaitu menjadi sebesar 57% dari luas daratan. Setidaknya, perubahan SK tersebut mengakibatkan penyusutan kawasan hutan seluas 601,3 ribu hektar.

Grafik 7. Persentase terhadap Luas Daratan Akibat Perubahan



Perubahan komposisi kawasan tersebut tentunya mempengaruhi target emisi yang telah ditentukan sebelumnya. Resiko emisi yang dihasilkan memungkinkan lebih besar dari target yang telah ditentukan sebelumnya. Hal ini diakibatkan oleh bertambahnya kawasan APL sebesar 601,3 ribu hektar. Jika mengacu pada trend yang berlangsung pada periode sebelumnya, deforestasi tertinggi justru terjadi pada hutan dikawasan APL. Sepanjang 2009-2011, tutupan hutan dikawasan APL mengalami penyusutan hingga 3,26 ribu hektar. Sehingga, jika luas kawasan APL ditambah, maka total hutan yang tersisa dapat dipastikan mengalami penyusutan yang signifikan.

Grafik 8. Deforestasi per Status Kawasan



D. Ancaman Kebakaran Hutan

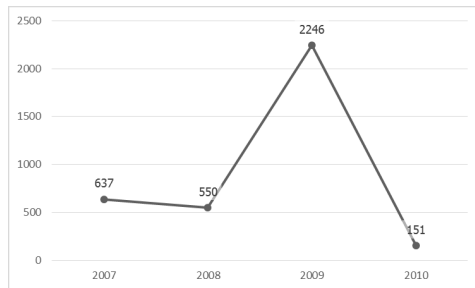
Salah satu faktor yang mempengaruhi meningkatnya CO₂-eq adalah kebakaran hutan yang merupakan kejadian tahunan di Kalimantan Barat. Kebakaran hutan secara langsung akan mengubah cadangan karbon menjadi gas-gas rumah kaca. Beberapa hal yang menyebabkan terjadinya kebakaran, antara lain aktivitas masyarakat dalam membersihkan semak belukar, serta perambahan hutan untuk lahan pertanian (Pemprov Kalbar, 2012, hal. II-34), bahkan juga terindikasi adanya kesengajaan perusahaan perkebunan dalam melakukan pembukaan lahan (Carlson, et al., 2012).

Jika menggunakan data yang digunakan pada saat penyusunan baseline, luas kebakaran hutan di Kalimantan Barat terparah terjadi pada tahun 2009, yaitu lebih dari 2000 hektar (Pemprov Kalbar, 2012, hal. II-35). Luas tersebut, sesungguhnya tidak terlalu besar, bahkan tidak sampai dengan 1% jika dibandingkan dengan luas areal berhutan di Kalimantan Barat pada masa tersebut.

Permasalahannya, emisi yang dihasilkan dari kebakaran dan dampak lanjutan yang diderita gambut beresiko dalam meningkatnya jumlah emisi secara drastis, khususnya pada kawasan bergambut. Secara global lahan gambut menyimpan sekitar 329 – 525 giga ton (Gt) karbon dan sekitar 14% (70 Gt) terdapat di daerah tropis (Nurhayati, Aryanti, & Saharjo, 2010). Dampak kebakaran lahan gambut terhadap pemanasan global bisa mencapai lebih dari 200 kali lebih besar daripada kebakaran pada jenis lahan

lainnya (Harris, Minnemeyer, Stolle, & Payne, 2015).

Grafik 9. Kebakaran Hutan dan Lahan Gambut 2007-2010

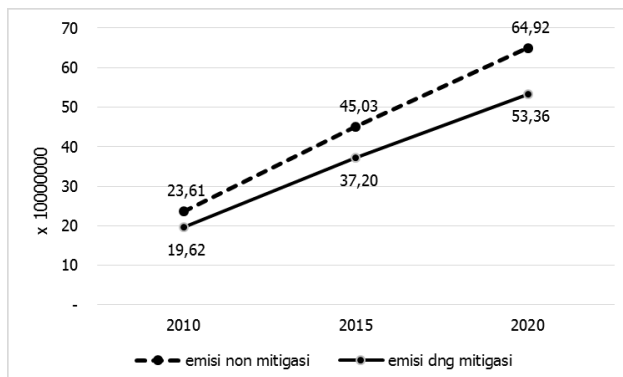


Sumber. Dok RAD-GRK 2012

III. AKSI DAERAH DALAM PENURUNAN EMISI GRK

Baseline ditahun 2010, yang dijadikan acuan pada Pergub no. 27 tahun 2012 adalah sebesar 196,2 juta ton CO₂-eq, dan diperkirakan emisi yang dihasilkan dari sektor kehutanan dan lahan gambut ditahun 2020 adalah sebesar 533,6 juta ton CO₂-eq. Besaran emisi perkiraan ditahun 2020 telah disesuaikan dengan total kemampuan penyerapan sebesar 115,6 juta ton CO₂-eq ditahun 2020. Target penurunan emisi Kalimantan Barat disektor kehutanan dan lahan gambut hanya sebesar 18% dari peningkatan emisi tanpa adanya aksi mitigasi.

Grafik 10. Perkiraan Emisi GRK 2006-2020



Untuk memenuhi target tersebut, Rencana aksi daerah yang dirumuskan pada Pergub no. 27 tahun 2012, adalah:

1. Restorasi 35 ribu hektar lahan kering sekunder melalui skema HTR
2. Pemantapan Kawasan Konservasi dan Hutan Lindung (50 ribu hektar)
3. Penanaman HTI (300 ribu hektar)
4. Pengendalian Penebangan Liar (10 ribu hektar)
5. Pencegahan Deforestasi dan Alih Fungsi Hutan (20 ribu hektar)
6. Pengelolaan Air untuk mempertahankan muka air tanah <80cm pada lahan gambut yang dipergunakan untuk lahan pertanian Kelapa Sawit dan HTI (500 ribu hektar)
7. Pemantapan Kawasan Konservasi dan Hutan Lindung Gambut (250 ribu hektar)
8. Penunjukkan dan Penetapan Kawasan Lindung Gambut (300 ribu hektar)
9. Pembangunan Pertanian Tanpa Bakar (400 ribu hektar)
10. Pencegahan Deforestasi dan Alih Fungsi Hutan Gambut (400 ribu hektar)

Mengacu pada 10 rencana aksi tersebut, aksi mitigasi disederhanakan kembali menjadi 3 kelompok, yaitu:

*Tabel 3. Aksi Mitigasi Daerah Sub Sektor Kehutanan dan
lahan Gambut*

Aksi Penurunan Emisi	Penurunan Emisi Kumulatif (tCO₂-eq/ Tahun)	Kontribusi Penurunan Emisi	Aktivitas
Pemantapan kawasan hutan	220,817,073.8	42%	Melalui revisi RTRWP yang rigit dengan mempertahankan CA,HL,TN,TWA,SAD,SAL, dan mencegah konversi hutan primer dan sekunder menjadi penggunaan lain.(Luas ±3,539,000 Ha); ABG 170 tC/Ha, intensitas 80%
Rehabilitasi Hutan dan pemberdayaan masyarakat	43,018,550.79	17.65%	Pembangunan HTI, HTR, OBIT, HKm, Hutan Desa,RHL,KPHP,RE
Pengamanan hutan dan pengendalian kebakaran hutan	2,275,400	0,44%	Sosialisasi pencegahan kebakaran hutan secara dini, Pengamanan dan pengawasan hutan (4000 Ha/Thn); ABG 155 tCO/Ha

Sumber. Paparan Bappeda Prov. Kalbar, "Gambaran Umum Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca." Yogyakarta, 21 April 2016

A. Pemantapan Kawasan Konservasi dan Hutan Lindung

Luas daratan pada hutan lindung dan kawasan konservasi pada saat itu sebesar 3,8 ribu hektar. Jika mengacu pada aksi mitigasi yang tercantum pada pergub no. 27 tahun 2012, target pemantapan yang ingin dicapai seluas 300 ribu hektar², atau sebesar 8% dari total luas kawasan konservasi dan hutan lindung. Seperti yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, bahwa pada saat rumusan perencanaan aksi dibuat, status kawasan hutan masih mengacu pada SK Menhut No. 259/Kpts-II/2000, dengan total luas kawasan hutan dan konservasi perairan sebesar 9,2 ribu hektar. Namun, dalam perjalanannya, terdapat dua kali perubahan status kawasan hutan, yaitu ditahun 2013 melalui SK No. 936/MenhutII/2013, dan yang berlaku hingga saat ini adalah SK No. 733/Menhut-II/2014, dengan total kawasan hutan dan perairan seluas 8,4 ribu hektar.

Untuk total daratan kawasan konservasi dan hutan lindung pada SK tahun 2014, sebesar 3,7 ribu hektar. Sehingga tidak ada perubahan signifikan pada persentase target yang ingin dicapai dengan total kawasan konservasi dan hutan lindung.

2 Pemantapan kawasan konservasi dan hutan lindung seluas 50 ribu ha + Pemantapan Kawasan Konservasi dan Hutan Lindung Gambut seluas 250 ribu hektar

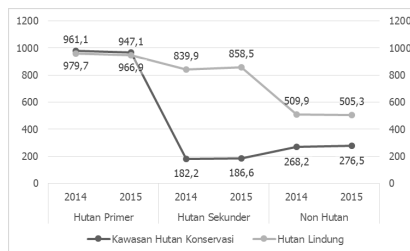
**Tabel 4. Perubahan Status Kawasan terhadap Persentasi Target
Pemantapan**

	259/Kpts-II/2000	733/Menhut-II/2014
Kawasan Konservasi Darat	1.457.695	1.430.101
Hutan Lindung	2.307.045t	2.310.874
% Target Pemantapan thd Total luas	8%	

Kemampuan Mempertahankan Tutupan Hutan pada Kawasan Konservasi dan Hutan Lindung

Untuk melihat kemampuan pelaksanaan pemanta-
pan kawasan konservasi dan hutan lindung, data yang
digunakan adalah tingkat deforestasi dan perubahan
tutupan lahan pada kedua kawasan tersebut³. Data
yang digunakan adalah Rekalkulasi Penutupan Lahan
2014-2015, Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan
Sumber Daya Hutan, dan Buku Deforestasi 2014-2015.
Data 2013 tidak dapat digunakan karena terjadi inkon-
sistensi terhadap luas kawasan akibat perubahan SK
Menteri Kehutanan tentang Status Kawasan Hutan di
Kalimantan Barat.

**Grafik 11. Perubahan Tutupan Lahan pada Kawasan
Konservasi dan Hutan Lindung 2014-2015 (dalam ribu hektar)**



³ Dokumen dapat diunduh pada <http://appgis.dephut.go.id/ap-pgis/download.aspx>

Seperti yang ditampilkan pada grafik 10, tutupan hutan primer pada kedua kawasan tersebut mengalami pengurangan dengan total 26,8 ribu hektar. Sedangkan hutan sekunder mengalami penambahan sebesar 23 ribu hektar, dan selebihnya, penambahan sebesar 3,7 ribu hektar merupakan areal tidak berhutan. Perubahan tutupan lahan yang terjadi pada kedua kawasan tersebut tentunya berpengaruh terhadap menurunnya kemampuan menyimpan cadangan karbon. Jika menggunakan asumsi yang digunakan pada saat penyusunan baseline, tentang komposisi kemampuan masing-masing tutupan lahan dalam menyimpan karbon, maka terjadi penyusutan kemampuan penyimpanan yang signifikan.

Tabel 5. Rerata Above Ground C Stock (ton/ha) berdasarkan Tutupan Lahan

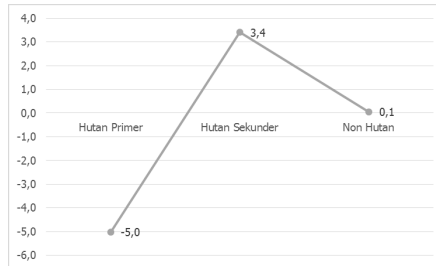
	Rata-rata Above Ground C Stock (ton/ha)	Keterangan
Hutan Primer	187,1	Hutan Rawa Primer, Hutan Lahan Kering Primer, dan Hutan Mangrove Primer
Hutan Sekunder	148,2	Hutan Rawa Sekunder, Hutan Lahan Kering Sekunder, dan Hutan Mangrove Sekunder
Non Hutan	15,0	Belukar Rawa, Semak Belukar

Sumber. Olahan Dok. RAD-GRK (Pemprov Kalbar, 2012, hal. II-41)

Pada tabel 5 menunjukkan bahwa terjadi perbedaan dalam kemampuan menyimpan cadangan karbon pada masing-masing tutupan lahan. Kemampuan tertinggi dalam menyimpan cadangan karbon berada pada hutan

primer, namun dikarenakan terjadi penyusutan luas pada kawasan hutan primer seluas 26,8 ribu hektar, dan disaat bersamaan terjadi peningkatan luas hutan sekunder dan areal non hutan seluas 23 ribu hektar dan 3,7 ribu hektar. Maka berpengaruh pada berkurangnya kemampuan dalam menyimpan cadangan karbon atas tanah menjadi minus 1,5 gigaton CO₂-eq.

Grafik 12. Perubahan Above Ground C Stock (Gigaton



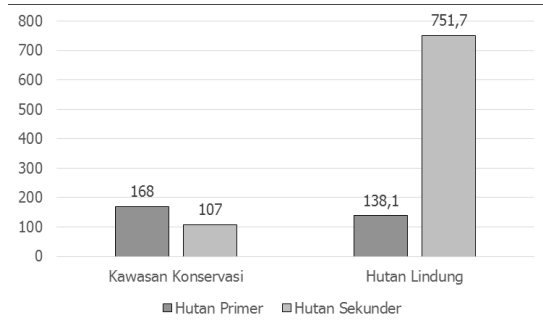
Dalam konteks aksi penurunan emisi GRK, perubahan tutupan lahan tersebut tentunya mengancam tercapainya target penurunan. Kemampuan menyimpan cadangan karbon atas tanah, jika mengacu pada tutupan lahan 2015 dengan generalisasi kemampuan penyerapan karbon berdasarkan tutupan lahan yang dirumuskan pada saat penyusunan baseline, maka kemampuan penyimpanan cadang di kawasan hutan lindung dan kawasan konservasi sebesar 528 gigaton CO₂-eq.

Kemampuan dalam Penanganan Deforestasi pada Kawasan Konservasi dan Hutan Lindung

Untuk memperkuat dugaan bahwa terjadi deforestasi pada kedua kawasan tersebut, tidak cukup dengan menampilkan perubahan tutupan lahan secara keseluruhan. Metode yang digunakan oleh kementerian

kehutanan dalam menghitung deforestasi melalui identifikasi lokasi-lokasi yang berubah dari penutupan hutan ke penutupan bukan hutan.

Grafik 13. Laju Deforestasi 2014-2015 (ha/thn)



Pada grafik 13 diatas menunjukkan bahwa laju deforestasi pada hutan dikedua kawasan tersebut sebesar 1,2 ribu hektar per tahun. Deforestasi tertinggi berada pada hutan sekunder dikawasan hutan lindung. Tentunya angka tersebut termasuk tinggi mengacu pada keterbatasan luas kedua kawasan tersebut.

Tabel 6. Komposisi Hutan pada Kawasan Konservasi dan Hutan Lindung 2015

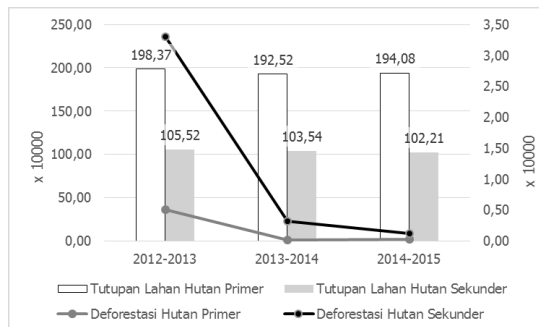
	Hutan Primer	Hutan Sekunder	Non Hutan	Total Luas Kawasan
Kawasan Hutan Konservasi	68%	13%	19%	1.430.101 ha
Hutan Lindung	41%	37%	22%	2.310.874 ha

Sumber: Rekalkulasi Penutupan Lahan 2015, Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan, KLHK 2017

Meskipun luas hutan yang hilang relatif besar, yaitu mencapai 1,2 ribu hektar, namun jika dibandingkan dengan deforestasi dan ketersediaan hutan pada kedua

kawasan tersebut menunjukkan adanya kemajuan dalam mengurangi laju deforestasi. Deforestasi tertinggi, paska diberlakukannya aksi daerah penurunan emisi, terjadi ditahun pertama yaitu 2012-2013, yaitu sebesar hampir 33 ribu hektar, atau sekitar 10 kali lipat deforestasi yang terjadi ditahun sebelumnya. Meskipun, jika mengacu pada ketersediaan hutan (primer dan sekunder) pada kawasan tersebut yang memiliki tutupan lebih luas, namun tetap saja kemajuan yang signifikan dalam mengatasi deforestasi ditahun berikutnya.

Grafik 14. Deforestasi terhadap Ketersediaan Hutan (Primer dan Sekunder) di Kawasan Konservasi dan Hutan Lindung



Pada grafik 14 dapat terlihat bahwa antara tahun 2012-2013 dan 2013-2014, terjadi penurunan tutupan hutan primer dan sekunder, dan disaat bersamaan, deforestasi yang terjadi mengikuti luas tutupan hutan tersebut. Namun, memasuki tahun 2013, aksi deforestasi mengalami penurunan yang signifikan. Meskipun tutupan hutan diantara kedua periode tersebut mengalami penurunan, namun jika dipersentasekan dengan deforestasi yang terjadi, tetap saja menunjukkan adanya penurunan laju deforestasi yang signifikan pada kedua kawasan tersebut.

Tabel 7. Persentase Deforestasi terhadap Ketersediaan Hutan pada Kawasan Konservasi dan Hutan Lindung

	2012-2013		2013-2014		2014-2015	
	Hutan Primer	Hutan Sekunder	Hutan Primer	Hutan Sekunder	Hutan Primer	Hutan Sekunder
Kawasan Konservasi	0,18%	4,01%	0,00%	0,38%	0,02%	0,06%
Hutan Lindung	0,33%	2,22%	0,02%	0,27%	0,01%	0,09%

Meskipun upaya mengatasi deforestasi pada kedua kawasan tersebut menunjukkan kemajuan yang signifikan, namun dalam konteks penurunan emisi GRK, perubahan tutupan lahan pada kedua kawasan tersebut berakibat pada meningkatnya pelepasan CO₂ dan mengancam gagalnya pencapaian target yang diinginkan. Hal ini menjadi penting mengingat keberadaan status kedua kawasan tersebut seharusnya tidak memungkinkan terjadi deforestasi, berbeda halnya dengan kawasan hutan produksi (terbatas, tetap, dan yang dapat dikonversi) yang dapat dieksploitasi untuk kepentingan pembangunan kehutanan dan non kehutanan.

Alokasi Belanja Pemantapan Kawasan Konservasi dan Hutan Lindung

Mengacu pada renstra dinas kehutanan 2013-2018, pemantapan kawasan konservasi dan hutan lindung dirumuskan pada strategi keempat, yaitu “peningkatan pengamanan dan perlindungan hutan, pengendalian kerusakan hutan, serta pengelolaan kawasan hutan lindung dan konservasi.” Salah satu sasaran dari strategi tersebut adalah “meningkatkan pengelolaan kawasan

hutan lindung dan konservasi” yang dirumuskan dalam program tahunan dinas kehutanan provinsi yaitu “Program Pengelolaan Hutan Lindung dan Konservasi Lainnya”. Dalam program tersebut, diturunkan kedalam 4 kegiatan, yaitu:

1. Kegiatan Pengumpulan Data dan Informasi Potensi Pemanfaatan Jasa Lingkungan pada Kawasan Hutan Lindung dan Konservasi Lainnya
2. Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Pengelolaan Hutan Lindung (Hutan Adat/Desa)
3. Kegiatan Pembinaan dan Monitoring Kawasan Konservasi Insitu dan Eksitu pada Unit Manajemen
4. Kegiatan Pembangunan Taman Hutan Raya Skala Provinsi

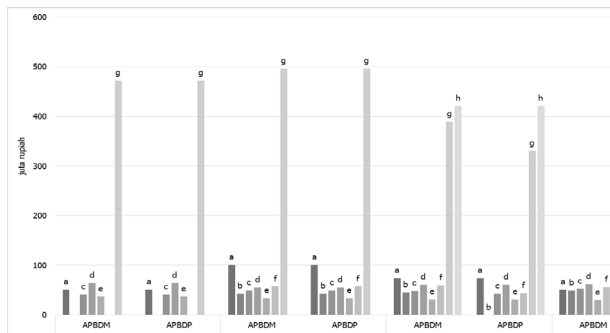
Disamping “Program Pengelolaan Hutan Lindung dan Konservasi Lainnya” yang menjadi agenda tahunan dinas kehutanan, terdapat beberapa kegiatan yang berdampak pada upaya menjaga kelestarian Hutan Lindung dan Kawasan Konservasi yang tersebar pada program lainnya, seperti;

1. Kegiatan Lomba Penghijauan Dan Konservasi Alam
2. Kegiatan Pemeliharaan Batas Kawasan Hutan
3. Kegiatan Penyusunan Profil Kawasan Hutan Lindung

Teridentifikasi 8 kegiatan tahunan yang diarahkan untuk pemantapan kawasan konservasi dan hutan lindung pada APBD Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat. Sesungguhnya, masih memungkinkan terdapat banyak kegiatan lain yang juga berkontribusi bagi pembangunan kawasan konservasi dan hutan lindung, namun kegiatan yang menjadi agenda tahunan tersebut

tidak secara spesifik diarahkan pada pengembangan dan pemantapan kawasan konservasi dan hutan lindung, seperti halnya kegiatan yang ada pada “Program Pengembangan Sumber Daya Masyarakat Hutan,” dan “Program Pengendalian Tindak Pelanggaran Eksploitasi Kehutanan Dan Kerusakan Hutan.” Namun dikarenakan tidak secara khusus lokasi program berada pada kawasan hutan lindung dan kawasan konservasi, maka dikeluarkan dari bagian ini dan dikelompokkan pada aksi mitigasi yang lain.

Grafik 15. Komposisi Belanja untuk Pemantapan Kawasan Konservasi dan Hutan Lindung



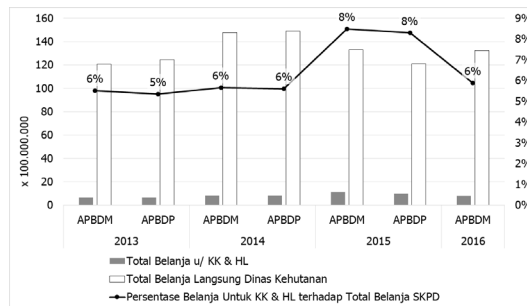
Keterangan:

- Pembangunan Tahura Skala Provinsi
- Pemberdayaan Dan Pengembangan Pengelolaan Hutan Lindung (hutan Adat / Hutan Desa)
- Pengumpulan Data Dan Informasi Keanekaragaman Hayati Pada Hutan Lindung
- Pengumpulan Data Dan Informasi Potensi Pemanfaatan Jasa Lingkungan Pada Hutan Lindung Dan Kawasan Konservasi Lainnya
- Pembinaan dan Monitoring Kawasan Konservasi Insitu dan Eksitu pada Unit Manajemen
- Lomba Penghijauan Dan Konservasi Alam
- Pemeliharaan Batas Kawasan Hutan
- Penyusunan Profil Kawasan Hutan Lindung

Grafik 15 menunjukkan bahwa alokasi belanja tertinggi untuk pemantapan kedua kawasan tersebut berada ditahun 2014, dan cenderung mengalami penurunan ditahun berikutnya untuk masing-masing kegiatan dimulai tahun 2015. Namun menariknya, terdapat 1 kegiatan baru yang muncul ditahun 2015, yaitu Penyusunan Profil Kawasan Hutan Lindung. Alokasi belanja untuk pemantapan kawasan konservasi dan hutan lindung cukup banyak dialokasikan pada Unit Inventarisasi dan Pemetaan Hutan (UIPH), yang merupakan bagian dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat.

Diakibatkan bertambahnya 1 kegiatan dimulai pada tahun 2015, maka jumlah keseluruhan kegiatan untuk pemantapan kawasan konservasi dan hutan lindung mengalami penambahan jumlah. Pada grafik 16 dapat terlihat bahwa sebelumnya alokasi belanja untuk kedua kawasan tersebut berkisar antara 5%-6% dari total belanja langsung Dinas Kehutanan, dan mengalami pelonjakan ditahun 2015 menjadi 8% dari total belanja langsung. Namun, memasuki tahun 2016, alokasi belanja tersebut kembali mengalami penurunan dengan mengurangi jumlah belanja per kegiatan, sehingga tetap menjadi 6% ditahun 2016.

Grafik 16. Rasio Belanja Untuk Kawasan Konservasi dan



A. Rehabilitasi Hutan dan Pemberdayaan Masyarakat

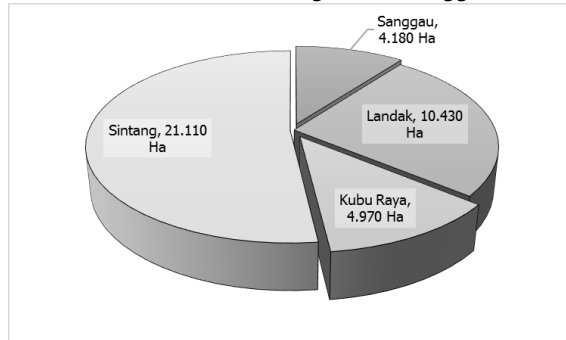
Restorasi 35 ribu hektar lahan kering sekunder melalui skema HTR

Luas hutan lahan kering sekunder yang tersedia pada saat perumusan baseline adalah seluas 2.394.571,03. Yang dimaksud dengan hutan lahan kering adalah seluruh kenampakan hutan dataran rendah, perbukitan dan pegunungan yang telah menampakan bekas penebangan (kenampakan alur dan bercak bekas tebang). Pada kawasan ini termasuklah bekas tebangan areal HTI, perkebunan, atau pertanian. Pada bekas tebangan parah yang bukan bagian dari areal HTI, perkebunan, dan pertanian, dikategorikan sebagai "Lahan Terbuka" (Pemprov Kalbar, 2012, hal. II-37). Seluas 35 ribu hektar dari area tersebut diperuntukkan untuk direstorasi melalui skema HTR.

Target restorasi lahan kering yang tercantum pada Pergub RAD-GRK adalah sebesar 35 ribu hektar. Pada saat penyusunan baseline, pemprov dapat optimis terhadap capaian ini, mengingat luas kawasan yang telah dicadangkan untuk HTR mencapai lebih dari 40,7 ribu

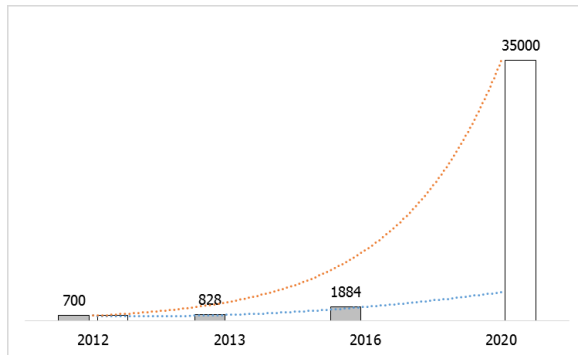
hektar yang tersebar di 4 kabupaten (Sanggau, Landak, Kubu Raya, dan Sintang). Setidaknya, telah diperoleh persetujuan dari kementerian untuk pencadangan HTR yang melebihi luas target untuk penurunan emisi GRK.

Grafik 17. Luas Pencadangan HTR hingga 2010



Permasalahannya, hingga ditahun 2013 izin pengelolaan (IUPHHK HTR) baru mencapai 828 hektar di 2 kabupaten, yaitu Kubu Raya seluas 700 ha (Koperasi Sungai Siloam) dan Sanggau seluas 128 ha (KTH Keruing dan KTH Meranti). Selanjutnya, ditahun 2016, mendapatkan penambahan izin seluas 382 ha di Mempawah dan 674 ha di Sanggau. Total luasan kawasan yang dikelola melalui skema HTR, hingga saat ini baru mencapai 5% (1.884 ha) dari target yang ditentukan. Seperti yang ditampilkan pada grafik diatas, setidaknya diperlukan IUPHHK HTR untuk luas 33.116 ha yang harus dicapai pada sisa 3 tahun (2017-2020).

Grafik 18. Target dan Realisasi HTR



Jika bersandarkan pada ketentuan bahwa luasan HTR terbesar yang dapat diperoleh oleh koperasi sebesar 700 hektar, setidaknya dibutuhkan sekitar 48 IUPHHK HTR yang dipegang oleh koperasi, hingga tahun 2020. Berdasarkan pada fakta tersebut, memungkinkan untuk tidak dapat mencapai target yang menjadi bagian dari aksi mitigasi penurunan emisi GRK. Asumsi tersebut mengacu pada capaian masa sebelumnya.

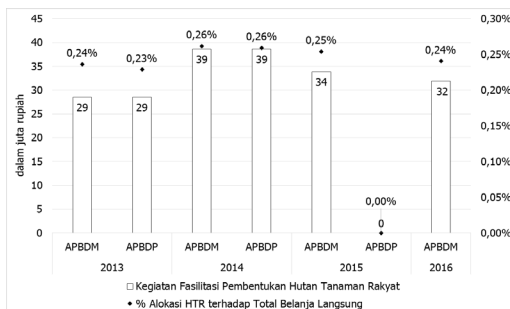
Alokasi Belanja Pembangunan HTR

Upaya dalam mendorong pertumbuhan HTR telah dirumuskan pada renstra dinas kehutanan prov. Kalimantan barat 2013-2018. Kegiatan “fasilitasi pembangunan HTR pada 5 kabupaten” merupakan bagian dari sasaran pembangunan kehutanan yang kedua, yaitu “Meningkatnya produktifitas kawasan hutan kritis dan pengelolaan hutan tanaman lestari, serta terbukanya lapangan kerja dan peluang berusaha bagi masyarakat didalam dan disekitar hutan.” Permasalahannya, pada renstra tersebut tidak mencantumkan luasan sebagai

target perencanaan. Renstra kehutanan hanya menargetkan jumlah kabupaten sebagai target kegiatan. Kondisi ini menunjukkan bahwa tidak adanya sinkronisasi antara RAD-GRK dengan target capaian dinas kehutanan prov. Kalbar.

Sepanjang tahun 2013-2016, rata-rata alokasi untuk belanja fasilitasi pembangunan HTR sekitar 28,5 jutaan pertahun⁴. Menariknya, ditahun 2015, pada APBD Perubahan kegiatan tersebut tidak dianggarkan pada belanja OPD Dinas Kehutanan (lihat grafik 19). Meskipun terjadi penundaan pembayaran DAU ditahun 2015, namun ditahun 2016 kegiatan ini tidak mendapatkan penambahan alokasi belanja. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun HTR merupakan salah satu aksi mitigasi yang tercantum secara eksplisit pada RAD-GRK, namun dalam pelaksanaannya, kegiatan ini tidak menjadi prioritas. Padahal, jika mengacu pada kajian sebelumnya, bahwa setidaknya banyak hal yang belum dapat dituntaskan untuk mencapai target dalam aksi penurunan emisi GRK.

Grafik 19. Alokasi Belanja Fasilitasi HTR 2012-2016 pada



4 Sesungguhnya angka rata-rata mencapai 33 jutaan, namun dikarenakan APBDP 2015 tidak dianggarkan, maka rerata alokasi belanja berkurang menjadi 28,5 jutaan

Alokasi biaya yang diperuntukkan berhasil memperoleh 5 IUPHHK HTR. 1 diantaranya, telah diperoleh pada tahun 2012, yaitu KSU Serba Usaha Sungai Siloam, Kubu Raya. Mengacu pada grafik 19 diatas, jumlah yang digunakan untuk memperoleh 4 IUPHHK HTR, sebesar 67,1 juta, sehingga diperkirakan biaya yang dibutuhkan untuk satu pemegang izin 16,7 juta⁵. Sedangkan untuk mencapai target ditahun 2020 seluas 35 ribu HTR, maka setidaknya diperlukan 48 pemegang IUPHHK HTR dengan luas maksimal 700 hektar. Beranjak dari pertimbangan tersebut, maka total biaya yang dibutuhkan dalam memperoleh IUPHHK HTR seluas 35 ribu hektar adalah 805,6 juta. Jika jumlah tersebut dibagi kembali dengan tahun yang tersisa hingga 2020, maka setidaknya tersedia 2 tahun pelaksanaan, yaitu 2018 dan 2019, yang seharusnya dialokasikan masing-masing sebesar 402,8 juta.

Perhitungan alokasi belanja untuk fasilitasi HTR tersebut masih sangat minimal, mengingat asumsi yang digunakan adalah koperasi yang mengusulkan luas maksimal HTR (700 hektar). Jika berkaca pada pengalaman sebelumnya, rata-rata luas yang diajukan pada 5 IUPHHK HTR adalah sebesar 374,8 hektar.

Tabel 8. Rata-Rata Luas IUPHHK HTR

No	IUPHHK HTR	Lokasi	Luas (Ha)
1	607/EKBANG/2016	Mempawah	382
2	238/EKBANG/2016	Sanggau	674

⁵ Jumlah alokasi belanja 2013+2014 dibagi dengan jumlah pemegang IUPHHK HTR

3	SK Bupati No 284/ Bunhuttam/2012	Kubu Raya	700
4	SK Bupati No. 549 tahun 2013	Sanggau	53
5	SK Bupati No. 550 tahun 2013	Sanggau	65
ta-rata			374,8

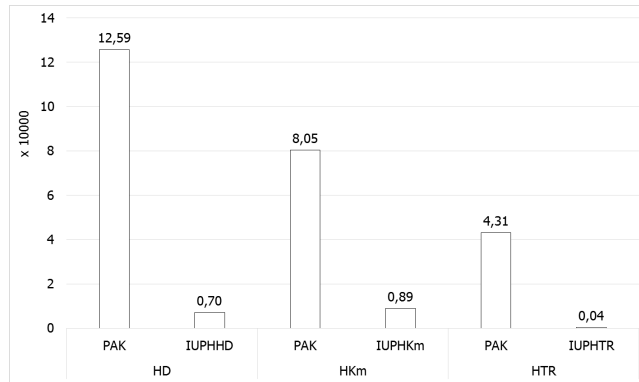
Mempertimbangkan Keberadaan Hutan Desa dan Hutan Kemasyarakatan

Meskipun perhutanan sosial, khususnya Hutan Desa (Hutan Desa) dan Hutan Kemasyarakatan (HKm) tidak termasuk kedalam aksi mitigasi yang dirumuskan pada pergub, namun keberadaan perhutanan sosial menjadi salah satu aksi mitigasi daerah sebagaimana yang tercantum pada tabel 3 sebelumnya. Pentingnya mendorong “Hutan dan Lahan untuk Masyarakat” sebagai salah satu isu strategis pada penanganan deforestasi dan degradasi lahan, yang tentunya akan berdampak langsung pada penurunan emisi GRK. Pertimbangan ini, disamping fakta bahwa lebih dari separuh hak pengelolaan hutan didominasi oleh pengusaha, masyarakat dipercaya memiliki kearifan lokal terhadap pengelolaan hutan. Perizinan yang diperuntukkan bagi masyarakat memperkecil peluang eksploitasi hutan skala besar untuk kepentingan komersil.

Berdasarkan agenda nawacita dan RPJMN 2015-2019, ditargetkan akses masyarakat untuk mengelola hutan melalui hutan kemasyarakatan, hutan desa, hutan tanaman rakyat, hutan adat dan hutan rakyat serta kemitraan seluas 12,7 juta ha. Di Kalimantan Barat, berdasarkan peta indikatif areal perhutanan sosial, target yang ingin dicapai adalah lebih dari 2 juta hektar yang tersebar di 13 Kabupaten.

Namun, jika mengacu pada kondisi yang terjadi hingga saat ini, mengisyaratkan bahwa pencapaian target tersebut merupakan hal yang mustahil. Izin kelola secara keseluruhan untuk perhutanan sosial (pada kategori Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, dan Hutan Tanaman Rakyat), hingga 2016 hanya 16,3 ribu hektar, atau seluas 0,8% dari target.

Grafik 20. Luas Pencadangan dan Izin Kelola Perhutanan



Meskipun jumlah PAK, seperti yang tercantum pada grafik 20 menunjukkan grafik yang cukup tinggi, namun tetap saja masih jauh dibawah target. Luas total PAK hingga 2016, seluas 249,4 ribu hanya dapat menyentuh batas 12,2% dari target perhutanan sosial. Belum lagi PAK yang ditampilkan pada grafik 20 memungkinkan gugur ataupun terancam gugur, mengingat cukup banyak yang diusulkan pada tahun 2011 dan 2012.

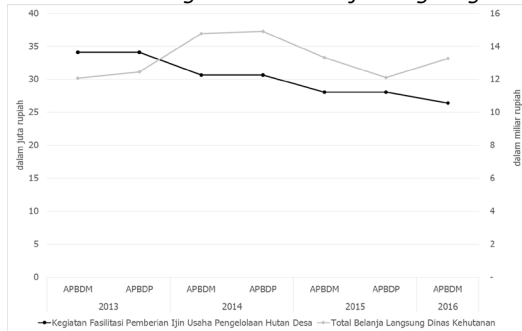
Alokasi Belanja Hutan Desa

Belanja kehutanan yang mendorong pembentukan hutan desa dialokasikan pada 1 kegiatan di Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat. Kegiatan tersebut melakukan fasilitasi pembentukan hutan desa sebagai

syarat untuk memperoleh izin pengelolaan (HPHD). Target per tahun yang dicapai pada kegiatan tersebut hanya sebanyak 1 hutan desa dengan mengabaikan luasan dari kawasan yang diusulkan.

Alokasi belanja yang diperuntukkan dalam mendorong hutan desa sangat terbatas. Rata-rata alokasi belanja yang diperuntukkan bagi fasilitasi hutan desa hanya sebesar 30,2 juta pertahun atau sekitar 0,23% dari total belanja langsung⁶. Jika mengacu pada jumlah nominal belanja dinas kehutanan, dari tahun 2013 ke 2014, terjadi peningkatan nominal belanja, namun peningkatan jumlah alokasi belanja langsung tidak berdampak pada kegiatan pendorongan hutan desa. Bahkan sebaliknya, meskipun terjadi peningkatan ditahun 2014, kegiatan fasilitasi perizinan hutan desa justru mengalami penurunan. Untuk lebih jelas tentang perubahan alokasi untuk hutan desa dapat dilihat pada grafik 21.

Grafik 21. Perbandingan Total Belanja Langsung dengan



Cenderung turunnya alokasi belanja untuk hutan desa berakibat pada terbatasnya upaya dalam mendorong perluasan kawasan perhutanan sosial. Kegiatan

6 Akumulasi dari APBDM dan APBDP 2012-2015 + APBDM 2016

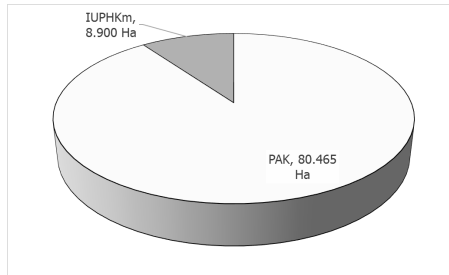
yang dilakukan pun terbatas pada fasilitasi tanpa adanya upaya pendampingan. Hingga 2016, luas PAK untuk perhutanan sosial 125,9 ribu hektar. Ironisnya, keseluruhan hutan desa tersebut merupakan inisiatif dari masyarakat desa yang didampingi oleh lembaga-lembaga non pemerintah.

Alokasi Belanja Hutan Kemasyarakatan

Sebelum bergesernya kewenangan kehutanan dari kabupaten ke provinsi dan pusat, kewenangan pemerintah provinsi cukup terbatas dalam mendorong fasilitasi Hutan Kemasyarakatan jika mengacu pada Peraturan Menteri Kehutanan No. P.88/Menhut-II/2014. Pada pasal 8 ayat (6), fasilitasi yang dilakukan dalam pengusulan areal kerja HKm merupakan kewenangan oleh Bupati/Walikota. Pemerintah provinsi, dapat terlibat, namun keberadaannya bukan merupakan kewajiban (pasal 11 ayat (4)). Diakibatkan oleh keterbatasan kewenangan, tersebut maka tidak ada keharusan bagi Pemerintah Provinsi untuk melakukan proses fasilitasi.

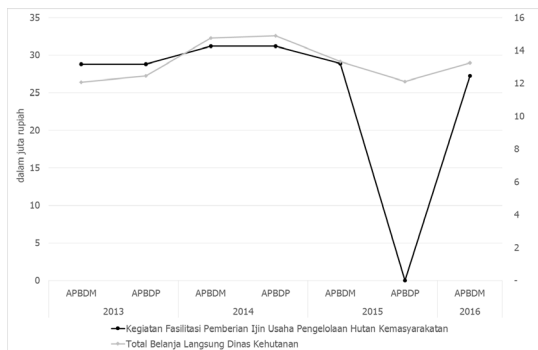
Namun, keterbatasan kewenangan yang dimiliki tidak berarti bahwa Dinas Kehutanan Provinsi tidak perlu untuk melibatkan diri dalam mendorong perluasan kawasan Hutan Kemasyarakatan. Hal ini mengacu pada masih kecilnya luasan yang telah memperoleh Penetapan Areal Kerja pada HKm di Kalimantan Barat. Hingga 2016, luas IUPHKm hanya sebesar 11% yang telah dicadangkan melalui keputusan menteri. Belum lagi usulan untuk mendapatkan pencadangan yang hingga 2015 telah mencapai 26 ribu hektar.

Grafik 22. Perbandingan antara PAK dan IUPHKm



Kondisi ini menunjukkan bahwa masih banyak hal yang perlu dibenahi dalam mendorong HKm di Kalimantan Barat, meskipun cukup mustahil untuk mencapai target yang telah ditetapkan pada RPJMN. Meskipun pertumbuhan HKm cukup terhambat, kondisi ini pun tidak mendapat dukungan dalam alokasi belanja daerah. Pengalokasian belanja untuk HKm menyerupai HTR, dimana kegiatan ini tidak menjadi prioritas. Hal ini ditunjukkan hilangnya alokasi belanja pada APBDP 2015, ketika terjadi penundaan DAU. Bahkan cenderung lebih kecil jika dibandingkan dengan Hutan Desa dan Hutan Tanaman Rakyat.

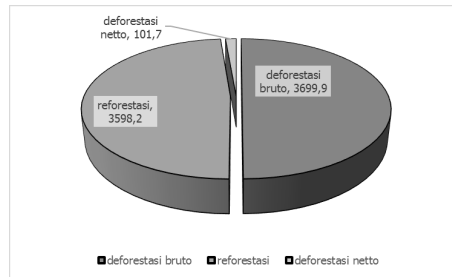
Grafik 23. Perbandingan Total Belanja Langsung dengan
Fasilitasi Hutan Kemasyarakatan



Pemantapan Kawasan HTI

Luas IUPHHK HTI hingga 2016 telah mencapai 1,9 juta hektar. Sejak dideklarasikannya RAD-GRK, terjadi penambahan seluas 190,4 ribu hektar untuk 8 pemegang IUPHHK-HTI. Sehingga terjadi peningkatan luas HTI sebesar 10% dari perumusan baseline. Target penanaman HTI untuk pengurangan emisi ditahun 2020, adalah seluas 300 ribu hektar, atau 16% dari total luas HTI ditahun 2016. Luas deforestasi bruto sepanjang 2014-2015 khusus pada kawasan IUPHHK-HTI adalah 3.699,9 atau seluas 8% dari total deforestasi bruto di Kalimantan Barat disepanjang tahun tersebut. Luas deforestasi pada kawasan HTI di Kalimantan Barat, sesungguhnya jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan kawasan sumatera, yang dapat mencapai 126 ribu hektar (Riau), atau seluas 70% dari total deforestasi bruto di kawasan tersebut. Bahkan, deforestasi dikawasan HTI Kalimantan Barat, lebih rendah dibandingkan dengan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur. Sedangkan untuk reforestasi pada tahun 2014-2015, untuk kawasan yang sama adalah seluas 3.598,2 hektar. Sehingga luas deforestasi (netto) yang tersisa hanya sebesar 101,7 hektar, atau setidaknya berhasil mengatasi 97% deforestasi bruto.

Grafik 24. Deforestasi pada kawasan IUPHHK-HTI 2014-2015



Sumber olahan Deforestasi 2014-2015, DIPSH, KLHK 2017

Meskipun pada grafik 24 masih menunjukkan angka deforestasi, namun setidaknya yang dihasilkan disepanjang tahun tersebut menunjukkan kemampuan dalam penanganan deforestasi bruto untuk kawasan HTI. Terlepas bahwa reforestasi yang dilakukan tersebut melalui aktivitas penanaman ataupun tidak, namun data yang ditampilkan menunjukkan adanya reforestasi lebih dari 3 ribu hektar.

Alokasi Belanja Pemantapan HTI

Alokasi belanja untuk optimalisasi HTI yang lestari berada pada "Program Rehabilitasi Hutan dan Pengembangan Hutan Tanaman⁷." Ragam kegiatan pada program ini tidak hanya terfokus pada aktivitas HTI, namun pula HTR. Dengan mengeluarkan kegiatan untuk HTR (untuk menghindari kekeliruan analisa), maka rata-rata alokasi belanja yang diperuntukkan

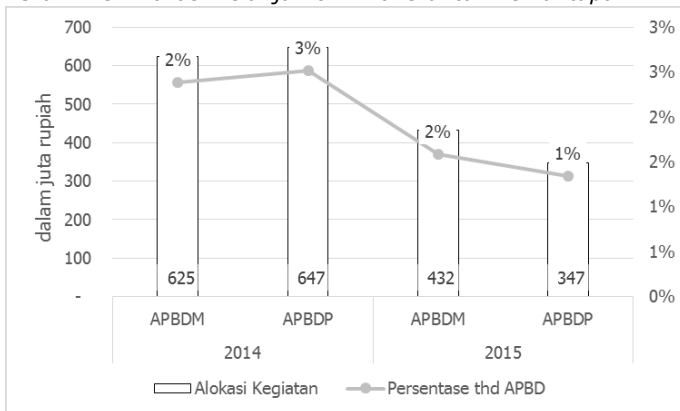
7

Ditahun 2013, beberapa kegiatan yang termasuk dalam

"Program Rehabilitasi Hutan dan Pengembangan Hutan Tanaman," berada dalam "Program Peningkatan Potensi Dan Produktifitas Kawasan Hutan Kritis." Namun, sejak 2014 kegiatan pada dua program tersebut digabung kedalam 1 program, yaitu "Program Rehabilitasi Dan Pengembangan Hutan Tanaman."

pada kegiatan ini sebesar 512,7 juta⁸, atau sekitar 1-3% dari total APBD pertahun.

Grafik 25. Alokasi Belanja 2014-2015 untuk Pemantapan HTI



Jika dilihat dari grafik 25, alokasi biaya yang dialokasikan untuk pemantapan HTI, tertinggi berada ditahun 2014, baik berdasarkan nominal yang dialokasikan, maupun persentase terhadap total APBD pada Dinas Kehutanan. Memasuki ditahun 2015, alokasi biaya tersebut mengalami penurunan. Keseluruhan kegiatan yang terakomodir pada grafik 17, yaitu:

1. Kegiatan Fasilitasi Budidaya Bibit Tanaman Kepada Masyarakat Dalam Rangka Rehabilitasi Hutan
2. Kegiatan Monitoring Dan Evaluasi Realisasi Tanaman RKTU PHHK-HT 1 Tahun Sebelumnya
3. Kegiatan Pembinaan Dan Pengendalian Dalam Rangka Pengesahan Rencana Reklamasi Hutan
4. Kegiatan Pembinaan Dan Pengendalian Sumber Benih Tanaman Hutan
5. Kegiatan Pembinaan Pelaksanaan RKTU

8
bahan

Hasil rerata dari 2014-2015 pada APBD Murni dan APBD Perubahan

PHHK-HT Tahun Berjalan

6. Kegiatan Pemetaan Perkembangan Perijinan IU PHHK-HT
7. Kegiatan Pendukung Kegiatan Puncak Aksi Hari Menanam Pohon Indonesia (HMPI)
8. Kegiatan Pengelolaan Lokasi Pengembangan Tanaman Unggulan Lokal
9. Kegiatan Pengelolaan Persemaian Dinas Kehutanan
10. Kegiatan Peningkatan Pemahaman Kepada Masyarakat Sekitar IUPHHK-HT

Diasumsikan bahwa kesepuluh kegiatan tersebut berkontribusi terhadap reforestasi seluas 3.598,2 hektar, maka berdasarkan rerata dari dua tahun tersebut (512,7 juta) maka dapat diasumsikan bahwa biaya reforestasi per hektar sebesar 142,5 juta perhektar. Angka tersebut memungkinkan lebih kecil, mengingat kegiatan yang dialokasikan tidak secara khusus fokus terhadap penanganan HTI. Untuk mengatasi deforestasi bruto sebesar 3,7 ribu hektar, maka biaya pertahun yang dibutuhkan sebesar 527,2 juta rupiah. Dengan alokasi biaya tersebut, maka tingkat deforestasi pada kawasan HTI dapat ditekan hingga 0% pertahunnya⁹.

A. Pengendalian Aktivitas Ilegal

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, telah berlangsung proses deforestasi dan perubahan tutupan lahan yang cukup tinggi pada kawasan konservasi dan hutan lindung. Mengingat status pada dua kawasan tersebut, tidak memungkinkan terjadinya

⁹ Kondisi ini memungkinkan terjadi hanya jika asumsi kesepuluh kegiatan tersebut difokuskan pada penanganan deforestasi HTI adalah benar.

aktivitas eksploitasi hutan yang berakibat pada hilangnya tutupan hutan skala besar. Untuk mengidentifikasi efektivitas penggunaan anggaran dalam pengendalian penebangan liar dan pencegahan deforestasi, maka penting untuk ditelusuri data deforestasi.

Tabel 9. Deforestasi pada kawasan berizin dan non izin pada 2014-2015

No	DEFORESTASI	Luas (Ha)	Keterangan
1.	Total Deforestasi Bruto	45.788,90	luas perubahan kondisi tutupan lahan dari kelas tutupan lahan kategori Hutan (berhutan) menjadi kelas tutupan lahan kategori Non Hutan (tidak berhutan)
2.	Deforestasi Perubahan Peruntukkan	35.435,80	Deforestasi untuk kepentingan perkebunan, transmigrasi, dan kepentingan lainnya
3.	Deforestasi Penggunaan Kawasan Hutan	5.197,20	Deforestasi untuk kepentingan IUPHHK-HA, IUPHHK-HTI, HTR, HD, HKM, dan HHBKHT
4.	Areal Non Izin pada Kawasan Hutan	5.156,00	
	Akibat kebakaran	1.600,30	

Pada tabel 9 dapat dilihat bahwa lebih dari 5 ribu hektar kawasan berhutan mengalami kehilangan tutupan hutan. Deforestasi tersebut terjadi pada kawasan yang tidak dipergunakan untuk izin apapun. Dalam hal ini, dapat diasumsikan bahwa sepanjang tahun 2014-2015, terdapat seluas 5,2 ribu hektar kawasan berhutan yang hilang akibat aktivitas ilegal. Jika mengacu pada total kawasan berhutan di Kalimantan Barat tahun

2014, maka kawasan yang tidak berhasil diamankan adalah kurang dari 1%. Sehingga, kemampuan dalam pengendalian tindak kejahatan hutan dapat dipertimbangkan berhasil.

Bahkan, jika mengacu pada kewenangan provinsi bahwa perlindungan hanya berada pada kawasan hutan lindung dan hutan produksi, dengan mengabaikan keberadaan perkebunan, maka tetap hasilnya kurang dari 1%.

Tabel 10. Perlindungan Kawasan Hutan dari Deforestasi

	Luas (Ha)
DEFORESTASI Kawasan Non Izin	5.156,00
KONSESI (Hingga 2014)	2.951.235,00
IUPHHK HA	1.058.930,00
IUPHHK HTI	1.875.851,00
SK HPHD	7.040,00
IUPHKm	7.540,00
IUPHHK HTR	1.874,00
LUAS KAWASAN (SK 733/2014)	6.570.637,00
HL	2.310.874,00
HPT	2.132.398,00
HP	2.127.365,00
KAWASAN YANG DILINDUNGI (Luas Hutan - Konsesi)	3.619.402,00
% Kawasan Hutan yang berhasil dilindungi	99,86%

Alokasi Belanja untuk Pengendalian Aktivitas Ilegal

Mengacu pada renja dan renstra dinas kehutanan, aktivitas pengamanan hutan berada pada "Program Pengamanan dan Pengendalian Kerusakan Hutan."

Biaya yang digunakan sejak 2014-2015, rata-rata sebesar 757,5 juta yang tersebar pada sebanyak 13 kegiatan pertahunnya, yaitu¹⁰:

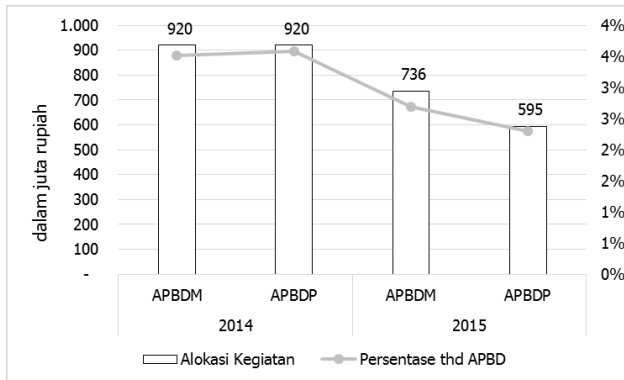
1. Kegiatan Investigasi Atas Pengaduan Pelanggaran Kehutanan
2. Kegiatan Koordinasi Penanggulangan Kejahatan Kehutanan Dan Penegakan Hukum
3. Kegiatan Monitoring Penanganan Pelanggaran Kehutanan Di Kabupaten
4. Kegiatan Operasi Intelijen Pengamanan Hutan Dan Hasil Hutan
5. Kegiatan Operasi Pengamanan Hutan Dan Hasil Hutan
6. Kegiatan Operasi Pengawasan Peredaran Hasil Hutan
7. Kegiatan Pembinaan Dan Monitoring Pengendalian Kerusakan Lingkungan Pada Unit Manajemen
8. Kegiatan Penanganan Kasus Tindak Pidana Kehutanan (penyelidikan & Penyidikan)
9. Kegiatan Pendataan Dan Koordinasi Pelaksanaan Tugas Polhut dan PPNS
10. Kegiatan Pengumpulan Dan Pengolahan Data Kerusakan Hutan
11. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Pengamanan Hutan
12. Kegiatan Peningkatan Kerjasama Dalam Kerangka Sosek Malindo
13. Kegiatan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Temuan

Pada tahun 2015, dua dari 13 kegiatan diatas tidak lagi dilaksanakan, yaitu (1) Kegiatan Peningkatan

10 Rerata dari jumlah total kegiatan pada APBDP 2014 dan 2015

Kapasitas Sumberdaya Pengamanan Hutan, dan (2) Kegiatan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Temuan. Akibatnya, jumlah biaya yang dialokasikan pada APBDP tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 35% dari APBDP tahun sebelumnya.

Grafik 26. Alokasi Belanja 2014-2015 untuk Pengendalian



Berdasarkan grafik 26, dapat terlihat bahwa pada APBD Perubahan 2014, dana pengamanan dialokasikan sebesar 920 juta. Melalui biaya tersebut, setidaknya berhasil mengamankan hampir seluruh kawasan berhutan di Kalimantan Barat¹¹.

Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan

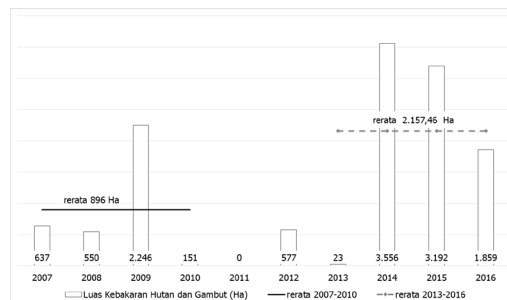
Jika mengacu pada grafik 9 pada bagian sebelumnya, menunjukkan adanya penurunan luas kebakaran ditahun 2010, dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Kondisi tersebut dijadikan asumsi dalam penyusunan baseline emisi GRK. Bahkan kondisi tersebut berlanjut hingga ditahun 2011. Namun, memasuki tahun 2014 luas kebakaran mengalami peningkatan cukup tinggi dibandingkan dengan tahun-tahun

¹¹ Kawasan Berhutan seluas 5,8 juta hektar dan deforestasi pada kawasan tidak berizin seluas 5.156 hektar

sebelumnya, meskipun memasuki tahun 2015 dan 2016 menunjukkan penurunan luas kebakaran hutan dan lahan. Namun, grafik 27 menunjukkan adanya permasalahan dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan pasca dideklarasikannya aksi mitigasi daerah dalam penurunan emisi GRK. Jika mengacu pada rata-rata 4 tahun pada saat penyusunan baseline (luas kebakaran hutan rata-rata 896 hektar per tahun), namun ketika aksi tersebut diberlakukan, justru terjadi peningkatan luas kebakaran lebih dari 2 kali lipat.

Kondisi ini sesungguhnya juga dipengaruhi oleh aktivitas badai El Nino ditahun 2015 yang mengakibatkan peningkatan drastis luas kebakaran dari tahun sebelumnya. Namun menariknya, jika mengacu pada data dari Manggala Agni (SiPongi, t.thn.), kebakaran yang terjadi ditahun 2015 justru lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2014. Meskipun fenomena El Nino berpengaruh langsung terhadap luasnya kebakaran, namun setidaknya ditahun 2014 menunjukkan adanya peningkatan signifikan terhadap luas kebakaran tanpa adanya pengaruh badai El Nino.

Grafik 27. Luas Kebakaran Hutan 2007-2016



Sumber: Olahan Dokumen RAD-GRK dan <http://sipongi.menlhk.go.id>

Alokasi Belanja Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan

Untuk melihat belanja daerah yang diperuntukkan dalam menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla), setidaknya terdapat 2 OPD pada level provinsi yang memiliki alokasi anggaran untuk pengendalian karhutla, yaitu UPKHL (Unit Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan) pada Dinas Kehutanan, Penanggulangan Bencana Daerah, dan Badan Lingkungan Hidup Daerah (sejak 2016 menjadi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup)¹².

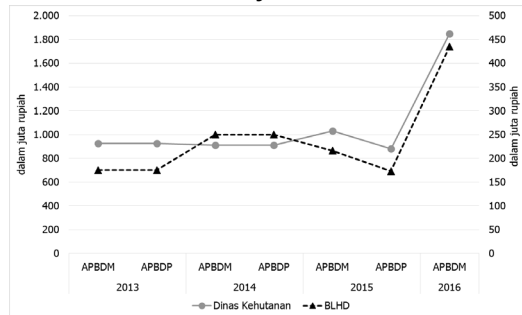
Dari kedua OPD tersebut, memiliki karakteristik berbeda dalam pengendalian karhutla, meskipun sejak tahun 2015, keduanya memiliki kesamaan kecenderungan. Seperti yang ditampilkan pada grafik 28, menunjukkan bahwa kedua OPD tersebut memiliki persepsi yang berbeda dalam menyikapi ancaman dalkarhutla. Dari tahun 2013 ke 2014, Dinas Kehutanan menunjukkan penurunan alokasi belanja dibandingkan dengan tahun sebelumnya, sedangkan BLHD justru mengalami lonjakan jumlah belanja ditahun 2014. Menariknya, jika gerakan jumlah belanja pada grafik 28 diselaraskan dengan data yang tampil pada grafik 27, justru ditahun 2014 lonjakan luas kebakaran hutan dan lahan mengalami peningkatan tajam. Dari gambaran tersebut setidaknya menggambarkan bahwa

12 Selain kedua OPD tersebut, sesungguhnya BPBD memiliki

peran strategis dalam pengendalian dalkarhutla. Namun pada program dan kegiatan tahunan, BPBD tidak secara khusus menangani permasalahan karhutla, melainkan bencana secara keseluruhan. Hal ini mempersulit dalam melakukan kategorisasi belanja daerah yang khusus diperuntukkan dalam penanganan karhutla. Akibatnya, belanja yang diperuntukkan pada BPBD pertahunnya diabaikan

kenaikan anggaran yang dilakukan pada tahun 2014 tidak berdampak pada penanganan kebakaran hutan dan lahan.

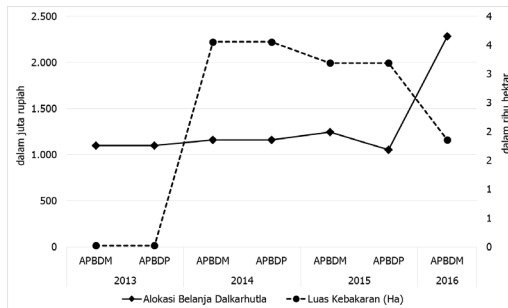
Grafik 28. Alokasi Belanja Dalkarhutla 2013-2016



Untuk dapat melihat utuh kontribusi alokasi belanja terhadap penanganan kebakaran hutan dan lahan dapat dilihat pada grafik 29. Pada grafik 29 menunjukkan adanya kecenderungan penurunan luas kebakaran hutan dan lahan sejak 2014, dan disaat bersamaan adanya peningkatan alokasi belanja ditahun yang sama. Bahkan perubahan yang signifikan dapat dilihat pada tahun 2016, dimana meningkatnya alokasi belanja yang hampir 2 kali lipat ditahun sebelumnya, berdampak pula pada penurunan luas kebakaran hutan¹³. Relasi antara belanja dan luas kebakaran yang ditampilkan pada grafik 29, mengisyaratkan bahwa luas kebakaran hutan dan lahan yang ada di Kalimantan Barat dipengaruhi pula oleh alokasi belanja yang diperuntukkan dalam dalkarhutla.

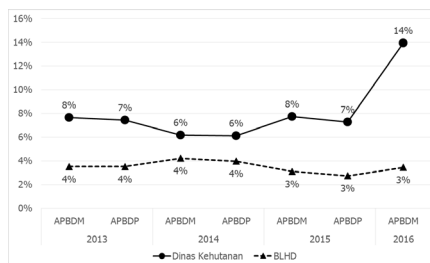
¹³ Peningkatan sebesar 117% pada APBDM 2016 dari APBDP 2015, dan penurunan luas kebakaran sebesar 42% ditahun 2016 dibandingkan dengan 2015.

Grafik 29. Perubahan Alokasi Belanja terhadap Luas



Namun, jika mengacu pada kebijakan dalam mengalokasikan anggaran, dari kedua OPD tersebut memiliki perspektif berbeda tentang urgensi dalkarhutla. Meskipun pada grafik 28 menunjukkan adanya peningkatan jumlah belanja memasuki tahun 2016, jika dihadapkan dengan jumlah total belanja langsung antara kedua OPD tersebut, justru Dinas Kehutanan yang mengalami peningkatan jumlah belanja dalkarhutla. Sedangkan BLHD justru menunjukkan adanya penurunan persentase alokasi belanja dibandingkan dengan jumlah belanja langsung. Perbedaan persepsi dalam menghadapi ancaman dalkarhutla, tentunya dipengaruhi oleh perbedaan urusan pokok masing-masing OPD.

Grafik 30. Persentase Alokasi Belanja Dalkarhutla terhadap



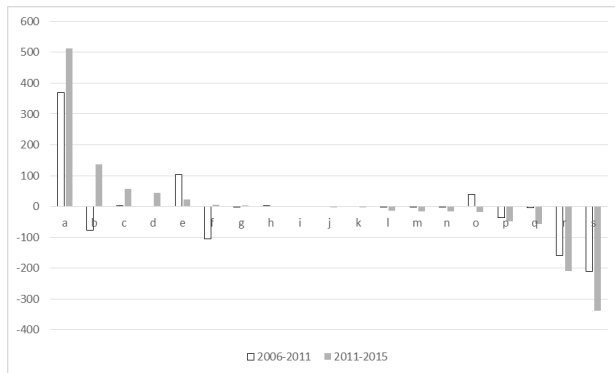
IV. ANCAMAN PENCAPAIAN TARGET PENURUNAN EMISI GRK

Jika dibagian sebelumnya, teridentifikasi beberapa tantangan yang memungkinkan menghambat pencapaian target. Pada bagian ini akan ditampilkan perkembangan dari beragam faktor yang dianggap berpotensi dalam menghambat tujuan.

A. Perubahan Tutupan Lahan

Seperti yang telah ditampilkan pada grafik 5 (bagian II) sebelumnya, terjadi perubahan tutupan lahan yang cukup signifikan dan berbanding terbalik dengan kemampuan lahan dalam penyerapan karbon. Disepanjang tahun 2006-2011, terjadi penurunan luas hutan dan berganti menjadi tanah terbuka dan perkebunan. Ironisnya, perubahan tutupan tersebut berdampak signifikan dalam penurunan emisi GRK. Ditahun 2015, aksi mitigas tidak terlalu berdampak terhadap perubahan tutupan lahan. Pola serupa dengan periode sebelumnya tetap terjadi.

**Grafik 31. Perubahan Tutupan Lahan 2006-2011 &
2011-2015**



- | | |
|----------------------------|--|
| b. Perkebunan | l. Permukiman |
| c. Sawah | m. Belukar rawa |
| d. Pertanian lahan kering | n. Hutan rawa primer |
| e. Hutan tanaman | o. Rawa |
| f. Tanah terbuka | p. Pertambangan |
| g. Semak/Belukar | q. Pertanian lahan kering campur semak |
| h. Hutan mangrove sekunder | r. Hutan lahan kering primer |
| i. Tambak | s. Hutan lahan kering sekunder |
| j. Hutan mangrove primer | t. Hutan rawa sekunder |
| k. Transmigrasi | |

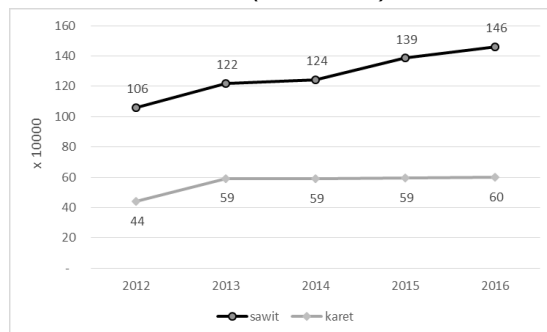
Seperti yang ditampilkan pada grafik 18 menunjukkan bahwa semakin parahnya keadaan. Perkebunan memiliki pertumbuhan yang tinggi dan berbanding terbalik dengan keberadaan hutan di Kalimantan Barat. Meskipun pada bagian III telah dijelaskan bahwa setidaknya dalam hal aksi mitigasi, beragam kegiatan yang dilakukan menunjukkan keberhasilan, kecuali penanaman kembali kawasan HTI. Kondisi ini menggambarkan bahwa aktivitas perubahan lahan lebih didominasi aktivitas legal dibandingkan tindak kejahatan

yang berakibat pada berkurangnya hutan. Kebutuhan pembangunan di Kalimantan Barat berakibat menurunnya kemampuan serapan karbon berdasarkan tutupan lahan.

A. **Pertumbuhan Perkebunan Kelapa Sawit**

Pada grafik 18 sebelumnya, luas lahan yang diperuntukkan bagi sektor perkebunan mengalami lonjakan yang signifikan. Meskipun masih terjadi perdebatan tentang karbon yang dilepas ke udara dan kemampuan menyerap karbon dari kelapa sawit, namun tingginya pertumbuhan kelapa sawit beresiko pada menurunnya kemampuan serapan karbon di Kalimantan Barat. Setidaknya, hasil prediksi Carlson et.al (2012) memprediksi bahwa perkebunan kelapa sawit di Kalimantan, memungkinkan untuk berkontribusi 18-22% dari total Emisi CO₂-eq yang ada di Indonesia pada tahun 2020. Hal ini dikarenakan pesatnya perluasan perkebunan berakibat menyempitnya kawasan berhutan, sebagaimana yang ditampilkan pada grafik 18 dan 19.

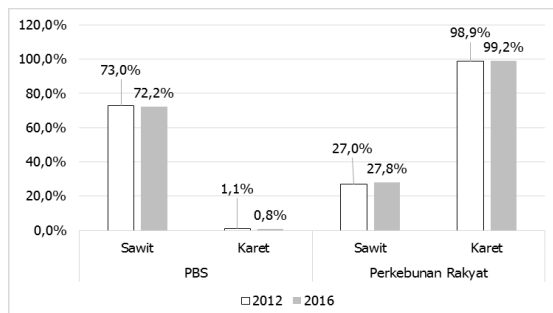
Grafik 32. Laju Pertumbuhan Luas Perkebunan Kelapa Sawit dan Karet (2012-2016)



Disamping luasnya perkebunan mengancam kawasan berhutan, banyak kajian yang memperhitungkan *opportunity cost* antara pendapatan daerah melalui sawit dengan penjualan karbon. Belum jelasnya pendapatan daerah dari perkebunan sawit berakibat banyak yang mencibir terhadap pesatnya pertumbuhan perkebunan sawit. Perlu dipertimbangkan ulang pendapatan bagi daerah dari perkebunan sawit, dengan cadangan karbon dari hutan yang digunakan untuk perkebunan.

Permasalahan lain yang ditimbulkan adalah ketidakberimbangan proporsi kepemilikan lahan perkebunan. Berdasarkan Kalbar Dalam Angka 2017 (BPS, 2017), menunjukkan bahwa terjadi perbedaan mencolok antara perkebunan karet dan perkebunan kelapa sawit dalam konteks kepemilikan lahan. Terdapat perbedaan karakteristik dalam hal pemanfaatan perkebunan. Pada grafik 20 ditampilkan bahwa sejak 2012, perkebunan karet lebih dapat diterima dan dikelola secara langsung oleh masyarakat. Berbeda halnya dengan perkebunan kelapa sawit, dimana lebih dari 70% merupakan PBS (Perkebunan Besar Swasta)

Grafik 33. Komposisi Kepemilikan Lahan Perkebunan Kelapa
Sawit dan Karet



V. POTRET ANGGARAN HIJAU: DUKUNGAN BELANJA KABUPATEN 2016 DALAM AKSI DAERAH

Untuk melihat kemampuan pembiayaan daerah dalam melaksanakan aksi penurunan emisi daerah, perlu juga diperhitungkan keberadaan kabupaten dalam mendukung rencana aksi tersebut. Berdasarkan dokumen RAD-GRK, kewenangan antara pusat dan daerah dalam pelaksanaan penurunan emisi GRK, dapat terlihat pada tabel berikut:

Tabel 11. Pembagian Kewenangan disektor Lahan

Nasional (K/L Terkait)	Provinsi (OPD Terkait)	Kabupaten/Kota (OPD Terkait)
Kehutanan dan Lahan Gambut		

Kewenangan dalam pengelolaan hutan konservasi, hutan produksi (tergantung skala) Kebijakan dan program kehutanan nasional Kebijakan nasional RTRWN, TGHK, RPJMN	Kewenangan dalam pengelolaan hutan produksi, hutan lindung (tergantung skala) Kesesuaian kebijakan dan program nasional dengan RTRWP, TGHK, RKTN. RPJMD	Kewenangan dalam pengelolaan hutan produksi, hutan lindung (tergantung skala) Kesesuaian kebijakan dan program nasional dengan RTRWK, TGHK, RKTN. RPJMD
Pertanian		
Kebijakan dan program pertanian nasional Kebijakan nasional RTRWN dan RPJMN Kewenangan dalam pengelolaan lahan irigasi lebih dari 10.000 Ha	Kewenangan dalam pengelolaan hutan produksi, hutan lindung (tergantung skala) Kesesuaian kebijakan dan program nasional dengan RTRWP, TGHK, RKTN. RPJMD	Kewenangan dalam pengelolaan hutan produksi, hutan lindung (tergantung skala) Kesesuaian kebijakan dan program nasional dengan RTRWK, TGHK, RKTN. RPJMD

Sumber. Dok RAD-GRK, Hal III-5

Berbeda dengan kajian sebelumnya yang hanya terfokus pada sektor kehutanan dan lahan gambut, pada bagian ini akan mencakup secara keseluruhan sektor lahan, yaitu Kehutanan dan Lahan Gambut dan Pertanian. Hal ini diakibatkan adanya perubahan kewenangan disektor kehutanan akibat terbitnya UU No. 23 tahun 2014, dimana banyak kewenangan kehutanan pada pemerintah kabupaten, bergeser

menjadi kewenangan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Namun, perpindahan kewenangan tersebut tidak secara otomatis menjadikan pemerintah kabupaten terlepas dari tanggung jawab penurunan emisi GRK.

Mengacu pada pertimbangan tersebut, maka penting untuk melihat keterlibatan pemerintah kabupaten dalam aksi daerah penurunan emisi GRK. Analisis pada bagian ini dimaksudkan untuk melihat sejauhmana pemerintah daerah Provinsi Kalbar maupun Pemerintah Daerah Kabupaten di wilayah kerja (Heart of Borneo), yaitu Kapuas Hulu dan Sintang, dalam merencanakan program dan mengalokasikan anggaran masing-masing sektornya sesuai dengan target yang ingin dicapai dalam dokumen RAD-GRK Kalbar. Selain itu, pada bagian inipun menampilkan secara makro potret anggaran baik dari sisi penerimaan maupun pengeluaran dalam pencapaian target RAD – GRK Kalbar.

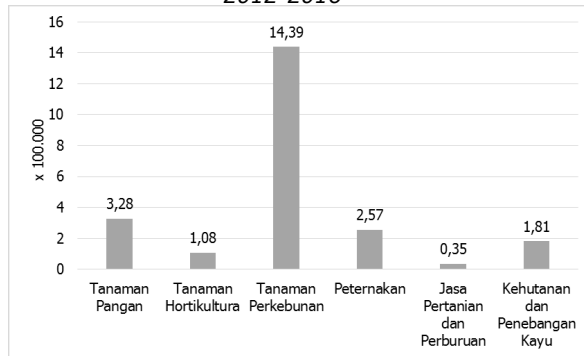
A. Kabupaten Sintang

Untuk melihat pertumbuhan ekonomi, umumnya digambarkan melalui pertumbuhan PDRB. Namun, PDRB tidak secara langsung berdampak bagi pendapatan daerah. Banyak riset menunjukkan hasil beragam tentang keterkaitan antara PDRB dengan pendapatan dan belanja daerah, sehingga belum diperoleh titik temu.

Pertumbuhan ekonomi, yang digambarkan melalui PDRB Kabupaten Sintang, berada pada sektor pengelolaan lahan. Sejak 2012-2016, dari masing-masing sektor yang ada pada pengelolaan lahan, PDRB tertinggi, baik berdasarkan harga berlaku maupun harga konstan, berada pada sektor perkebunan. Selanjutnya,

sektor tanaman pangan dan peternakan.

*Grafik 34. Rerata PDRB atas Harga Berlaku Kab. Sintang
2012-2016*

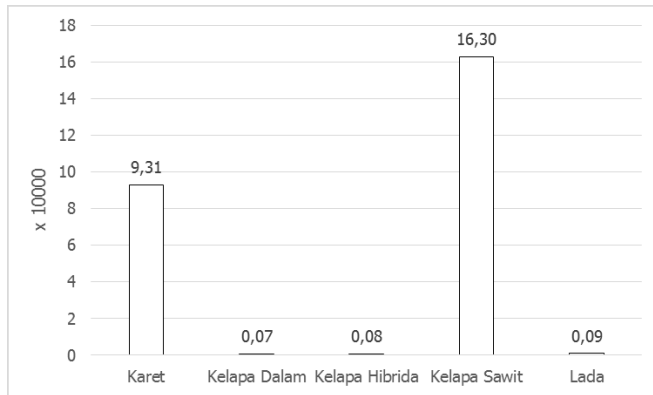


Sumber. Sintang dalam Angka 2017

Pada grafik 18 dapat terlihat bahwa pertumbuhan tanaman perkebunan cukup tinggi dibandingkan dengan sektor pengelolaan lahan lainnya. Pertumbuhan tanaman perkebunan, melebihi sebanyak lebih dari 4 kali lipat dari sektor tanaman pangan, ataupun lebih dari 13 kali lipat sektor tanaman hortikultura.

Tingginya pertumbuhan sektor perkebunan, berdasarkan grafik 16 diatas, dipengaruhi langsung oleh pertumbuhan kelapa sawit. Lahan terluas yang digunakan untuk produksi perkebunan, adalah lahan kelapa sawit, yaitu 163 ribu hektar. Pada urutan kedua adalah perkebunan karet yang luasnya sebesar 57% dari luas perkebunan sawit. Selebihnya, seperti lada dan kelapa, jauh dibawah rata-rata.

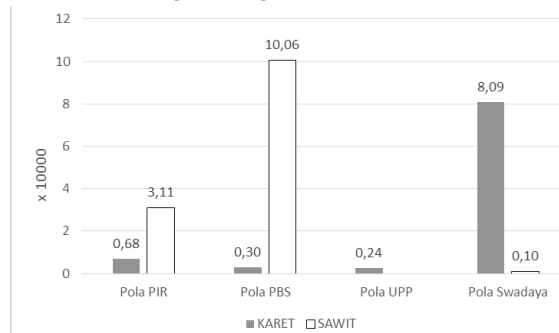
Grafik 35. Luas Perkebunan per Jenis



Sumber. Sintang dalam Angka 2017

Dalam hal kepemilikan, terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara perkebunan kelapa sawit dan perkebunan karet. Disamping luas perkebunan yang tinggi, pada perkebunan kelapa sawit pun didominasi oleh perkebunan besar swasta.

Grafik 36. Pola Pengembangan Perkebunan Sawit dan Karet



Seperti yang ditampilkan pada grafik 20 diatas, dapat terlihat perbedaan jelas dalam model pengembangan perkebunan. Tingginya PDRB yang ditampilkan pada grafik sebelumnya menunjukkan bahwa keterlibatan dan penerimaan manfaat pada pengelolaan

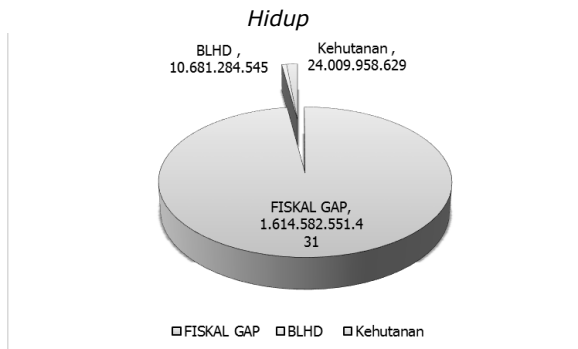
perkebunan cukup kecil, mengingat tingginya dominasi PBS pada perkebunan kelapa sawit.

Tagging Anggaran Hijau Kabupaten Sintang

PDRB tertinggi pada sektor perkebunan, khususnya kelapa sawit menunjukkan potensi pelepasan emisi yang cukup tinggi. Seperti yang telah dijelaskan pada Bab I, bahwa perkebunan kelapa sawit merupakan salah satu penyumbang emisi terbesar di Kalimantan (Carlson, et al., 2012).

Analisis makro yang dilakukan pada APBD Murni 2016, menunjukkan bahwa adanya fiscal gap sebesar 1,6 milyar. Jumlah dana transfer tersebut tidak secara otomatis menjadikan aktivitas untuk penurunan emisi disektor lahan menjadi tinggi. Alokasi biaya yang dipe-runtukkan bagi belanja OPD terkait, BLHD dan Dinas Kehutanan, hanya sebesar 2% dari fiscal gap.

Grafik 37. Fiscal Gap vs Belanja Kehutanan dan Lingkungan

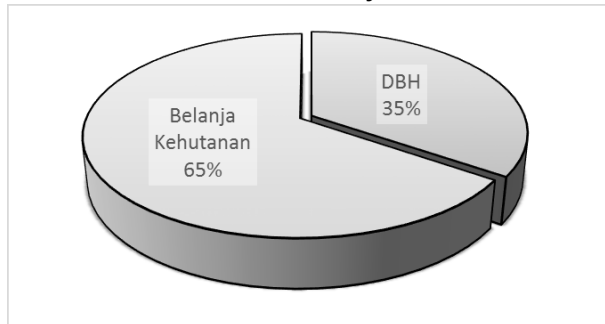


Yang dimaksud dengan fiscal gap adalah selisih antara kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal, yang dijadikan acuan dalam menentukan besarnya transfer dari pusat melalui Dana Alokasi Umum. Kebutuhan fiskal

adalah kebutuhan pendanaan daerah memberikan pelayanan dasar, sedangkan kapasitas fiskal adalah sumber pendanaan daerah yang berasal dari PAD dan Dana Bagi Hasil.

Namun, jika dilihat dari Dana Bagi Hasil SDA dengan belanja yang dialokasikan pada dinas kehutanan, menunjukkan bahwa belanja dinas kehutanan lebih tinggi dari perolehan dana bagi hasil. Hal ini mengindikasikan bahwa alokasi belanja pada dinas kehutanan telah ditopang dari sektor lainnya.

Grafik 38. DBH vs Belanja Kehutanan



Untuk melihat keberpihakan lainnya dalam mengatasi permasalahan yang ditimbulkan akibat pengelolaan lahan, dapat dilihat pula melalui komposisi belanja langsung dan tidak langsung.

Tabel 12. Komposisi Belanja Langsung vs Tidak Langsung

OPD	Belanja Langsung	Belanja Tidak Langsung
Dinas Kehutanan dan Perkebunan	72%	28%
Badan Lingkungan Hidup Daerah	70%	30%
Dinas Pertanian	91%	9%

Seperti yang ditampilkan pada tabel 9 menunjukkan bahwa masing-masing OPD mengalokasikan sebagian besar belanja dinas untuk kepentingan pencapaian tujuan program. Tabel tersebut mengindikasikan bahwa pemahaman terhadap pentingnya capaian tujuan program merupakan prioritas tahunan. Bahkan untuk dinas pertanian, lebih dari 90% belanja dinas dialokasikan untuk kepentingan pencapaian tujuan yang telah dirumuskan pada renja dan renstra.

Tabel 13. Tagging Anggaran Hijau Kab. Sintang 2016

(dalam juta rupiah)

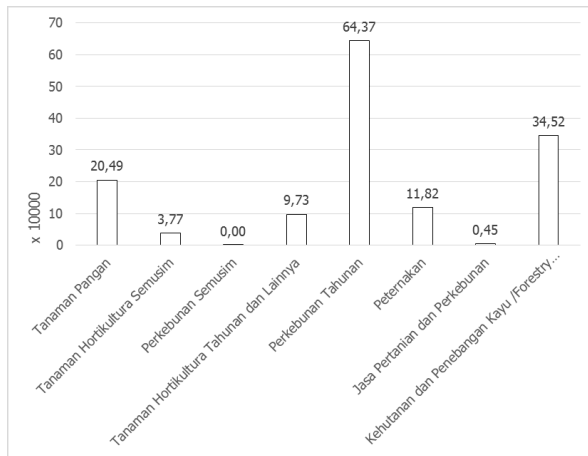
Sektor	SKPD	Pegawai	Barang & Jasa	Modal	% APBD
Perkebunan	Dishutbun	7,02	492,9		0,03%
Kehutanan dan Lahan Gambut	Dishutbun	2.062,7	10.219,6	70	0,67%
Pendidikan	BLHD	57,6	69,8	3,5	0,01%
Lingkungan	BLHD	35,9	554	1.950,7	
Pengolahan Limbah	BLHD	35,9	554	1.950,7	
Pertanian yang adaptif thd PI	Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan, BPPP	127,6	32.437,1		1,78%
Monev	BLHD, Badan Penyuluh Pertanian	81,9	1.547,9	534,7	0,12%
Pariwisata	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	18,7	583,5	665,7	0,07%
Total		2.245,2	45.904,9	3.224,6	2,80%
Persentase		4,37%	89,35%	6,28%	

Kabupaten Kapuas Hulu

Profil PDRB Kapuas Hulu menunjukkan kemiripan dengan Kabupaten Sintang, dimana PDRB tertinggi

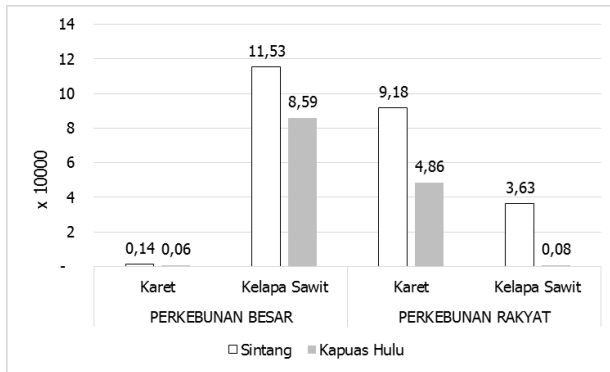
berada pada sektor pengelolaan lahan, khususnya perkebunan (BPS, 2017). Permasalahannya, data yang ditampilkan tidak secara spesifik menunjukkan profil perkebunan, ataupun bahkan model pengembangan perkebunan yang dimiliki. Namun, pada sektor perkebunan, karet dan kelapa sawit merupakan komoditi unggulan pada Kabupaten Sintang dan Kapuas Hulu, meskipun luas dan produksi di Kapuas Hulu tidak sebesar dengan Kabupaten Sintang.

Grafik 39. Rerata PDRB atas Harga Berlaku Kab. Kapuas Hulu
2013-2016



Sebagai gambaran, untuk mempermudah urgensi penanganan isu perubahan iklim akibat pengelolaan sektor lahan, dan pemanfaatan sektor tersebut untuk kepentingan masyarakat, dapat dilihat pada grafik 22.

Grafik 40. Rasio Peruntukkan Lahan Kelapa Sawit dan Karet
tahun 2015



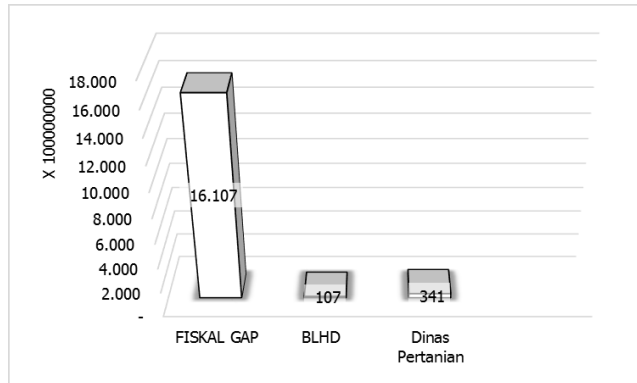
Sumber. Kalimantan Barat dalam Angka 2016

Seperti yang ditampilkan pada grafik 22, dapat terlihat bahwa secara keseluruhan pola pengembangan perkebunan yang dilakukan oleh Kabupaten Kapuas Hulu memiliki kesamaan dengan Kabupaten Sintang. Luas perkebunan terbesar berada pada perkebunan kelapa sawit, dan didominasi oleh perkebunan besar swasta.

Tagging Anggaran Hijau Kabupaten Kapuas Hulu

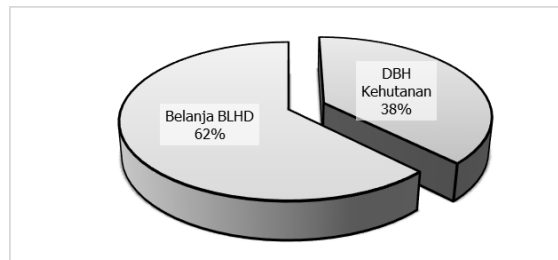
Disamping kesamaan pada pola pembangunan mengacu pada PDRB Kabupaten, pada kebijakan anggaran pun memiliki kemiripan dengan Kabupaten Sintang. Jika mengacu pada fiscal gap kabupaten kapuas hulu, belanja yang dialokasikan untuk penanganan masalah pengelolaan lahan sebesar 2%.

Grafik 41. Fiscal Gap vs Belanja Lingkungan Hidup dan Pertanian



Begitu pula pada proporsi antara Dana Bagi Hasil Kehutanan dengan Belanja Lingkungan seperti halnya yang ditampilkan pada grafik 23. Komposisi yang serupa dengan Kabupaten Sintang, bahwa belanja BLHD dialokasikan lebih besar dibandingkan dengan DBH Kehutanan.

Grafik 42. DBH Kehutanan vs Belanja BLHD



Untuk melihat keberpihakan lainnya dalam mengatasi permasalahan yang ditimbulkan akibat pengelolaan lahan, dapat dilihat pula melalui komposisi belanja langsung dan tidak langsung.

Tabel 14. Komposisi Belanja Langsung vs Tidak Langsung

OPD	Belanja Langsung	Belanja Tidak Langsung
Badan Lingkungan Hidup Daerah	83%	17%
Dinas Pertanian	70%	30%

Seperti yang ditampilkan pada tabel 11 menunjukkan bahwa masing-masing OPD mengalokasikan sebagian besar belanja dinas untuk kepentingan pencapaian tujuan program. Tabel tersebut mengindikasikan bahwa pemahaman terhadap pentingnya capaian tujuan program merupakan prioritas tahunan.

Tabel 15. Tagging Anggaran Hijau Kab. Kapuas Hulu 2016

(dalam juta rupiah)

Sektor	SKPD	pegawai	Barang & Jasa	Modal	% dari Total APBD
Kehutanan dan Lahan Gambut	BPPD, BLHD	5,6	898		0,05%
Pendidikan Lingkungan	BLHD	448,4	873		0,08%
Pengolahan Limbah	PU	179,5	914,2	210	0,08%
Pertanian yang adaptif thd PI	Dinas Pertanian Tanaman Pangan & peternakan	35,4	4.993,4	1.117	0,36%
Monev	Bappeda, BLHD	177,2	633,8		0,05%
Total		846,1	8.312,5	1.327	
Prosentase		8,07%	79,28%	12,66%	0,62 %

V. PENUTUP

Dari keenam sektor yang menjadi sasaran penurunan emisi GRK, sektor pengelolaan lahan merupakan sektor yang perlu mendapat perhatian serius. Hal ini beranjak dari fakta bahwa kehutanan dan lahan gambut memiliki kontribusi tersebut dalam emisi GRK. Terlebih di Kalimantan Barat, lebih dari 90% emisi disumbangkan dari sektor pengelolaan lahan. Sehingga, cukup beralasan ketika target jumlah emisi pada sektor kehutanan dan lahan gambut tertinggi dibandingkan sektor lainnya, baik ditingkat nasional maupun tingkat lokal.

Tingginya target penurunan emisi disektor kehutanan dan lahan gambut bukan hal yang gampang. Terlebih ketika banyak fakta yang menunjukkan bahwa pengelolaan hutan dan lahan gambut, justru menunjukkan peningkatan yang signifikan. Semisal, perubahan tutupan lahan dari hutan menjadi lahan perkebunan. Hal ini berakibat pada kemampuan penyerapan karbon per hektar pada tiap tutupan lahan. Apalagi ketika pertumbuhan lahan perkebunan tersebut didominasi oleh perkebunan kelapa sawit, yang menyumbangkan

emisi cukup tinggi. Tantangan penurunan emisi pun semakin sulit ketika ditahun 2014, terjadi perubahan fungsi kawasan hutan, yang berakibat pada bertambahnya luas lahan pada kawasan APL.

Beranjak dari tantangan tersebut, maka target penurunan emisi disektor kehutanan dan lahan gambut hanya sebesar 18% dari perkiraan kenaikan emisi tanpa aksi mitigasi. Untuk mencapai target tersebut, dirumuskan 10 aksi mitigasi, yang disederhanakan kembali menjadi 3 kelompok, yaitu (1) pemantapan kawasan hutan, (2) rehabilitasi hutan dan pemberdayaan masyarakat, dan (3) pengamanan hutan dan pengendalian kebakaran hutan.

Untuk pemantapan kawasan hutan, difokuskan pada kawasan konservasi dan hutan lindung. Hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan bahwa dalam Pergub No. 27/2012, secara eksplisit menyebutkan pemantapan kawasan hutan lindung dan konservasi sebagai bagian dari aksi daerah. Sepanjang 2014-2015, terjadi pengurangan luas hutan primer pada dua kawasan hutan tersebut. Dan disaat bersamaan, terjadi peningkatan luas hutan sekunder dan non hutan. Fokus aktivitas dinas kehutanan, jika dilihat pada komposisi belanja untuk program pemantapan kawasan konservasi dan hutan lindung, menunjukkan prioritas untuk pembangunan Tahura skala provinsi. Namun, jika dibandingkan dengan tahun 2014, ditahun 2015 terjadi pengurangan nominal untuk masing-masing kegiatan.

Pada rehabilitasi hutan dan lahan, fokus kajian dilakukan pada pembangunan HTR dan HTI, dengan

pertimbangan bahwa kedua sasaran tersebut secara eksplisit dirumuskan pada aksi daerah. Target pembangunan HTR seluas 35 ribu hektar terkesan mustahil untuk dilakukan mengingat hingga tahun 2015 baru mencapai 5%. Sedangkan untuk pemantapan kawasan HTI, tidak terlalu berat, mengingat deforestasi netto hanya seluas 101,7 hektar. Angka tersebut diperoleh setelah dilakukannya reforestasi seluas 3,6 ribu hektar di kawasan HTI. Sedangkan untuk pengendalian aktivitas ilegal, seluas lebih dari 5 ribu hektar terjadi deforestasi pada kawasan yang tidak berizin, atau kurang dari 1% dari total kawasan berhutan di Kalimantan Barat pada tahun 2014.

Aksi pemerintah provinsi dalam penurunan emisi GRK, mendapat dukungan dari pemerintah kabupaten. Dari sampel yang diambil, Kapuas Hulu dan Sintang, menunjukkan kemiripan dalam kebijakan anggaran disektor kehutanan dan lingkungan hidup. Pada PDRB kedua kabupaten tersebut, sektor perkebunan sawit yang dominan, dan mayoritas perkebunan tersebut merupakan perkebunan besar swasta. Namun, dalam kebijakan anggaran menunjukkan adanya keberpihakan dalam mengatasi permasalahan kehutanan dan lingkungan hidup.

Meskipun secara keseluruhan menunjukkan adanya keberhasilan dalam hal pengelolaan hutan dan lahan gambut, tapi tidak serta merta menghilangkan ancaman meningkatnya emisi GRK. Potensi kehilangan kendali terhadap pelepasan CO₂-eq sangat memungkinkan ketika tingkat deforestasi yang dilakukan secara legal mengancam kawasan yang memiliki serapan karbon

tinggi. Untuk itu, penting bagi pemerintah daerah untuk mengevaluasi dan mengkaji ulang kebijakan-kebijakan terkait dengan pengelolaan hutan dan lahan.

DAFTAR PUSTAKA

1. BAPPENAS. (2014). Potret Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK). BAPPENAS.
2. BPS. (2017). Kalbar dalam Angka 2017. Badan Pusat Statistik.
3. BPS. (2017). Kapuas Hulu dalam Angka 2017. Kapuas Hulu: Badan Pusat Statistik.
4. Carlson, K. M., Curran, L. M., Asner, G. P., Pittman, A. M., Trigg, S. N., & Adeney, J. M. (2012). Carbon Emissions from Forest Conversion by Kalimantan Oil Palm Plantations. *Nature Climate Change* 3/ doi:10.1038/nclimate1702, 283–287.
5. DIPSDH. (2017). Deforestasi Indonesia Tahun 2014-2015. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
6. Harris, N., & Sargent, S. (2015, Oktober 16). WRI Indonesia. Dipetik Agustus 14, 2017, dari World Resources Institute: <http://www.wri-indonesia.org/id/blog/kebakaran-hutan-di-indonesia-menghasilkan-emisi-harian-yang-lebih-besar-daripada-emisi>
7. Harris, N., Minnemeyer, S., Stolle, F., & Payne, O. A. (2015, Oktober 16). WRI Indonesia. Dipetik Agustus 14, 2017, dari World Resources Institute: <http://www.wri-indonesia.org/id/blog/kebakaran-hutan-di-indonesia-menghasilkan-emisi-harian-yang-lebih-besar-daripada-emisi>
8. Maswar. (2012). Estimasi Emisi Gas Rumah

- Kaca (GRK) dari Kebakaran Lahan Gambut. Seminar Nasional Pengelolaan Lahan Gambut Berkelanjutan (pp. 413-419). Bogor: Balai Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Retrieved from <http://balittanah.litbang.pertanian.go.id>.
9. Nurhayati, A. D., Aryanti, E., & Saharjo, B. H. (2010, Agustus). Kandungan Emisi Gas Rumah Kaca Pada Kebakaran Hutan Rawa Gambut di Pelalawan Riau. *Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia*, 15(2), 78-82.
 10. Pemprov Kalbar. (2012). Dokumen RAD-DRK. Pontianak.
 11. Purwanta, W. (2010). Penghitungan Emisi Karbon Dari Lima Sektor Pembangunan Berdasar Metode IPCC Dengan Verifikasi Faktor Emisi Dan Data Aktivitas Lokal. *Jurnal Teknologi Lingkungan*, 71-77.
 12. SiPongi. (t.thn.). Manggala Agni. Dipetik Agustus 15, 2017, dari SiPongi; Karhutla Monitoring Sistem: http://sipongi.menlhk.go.id/hotspot/luas_kebakaran
 13. Tosiani, A. (2015). Buku Kegiatan Serapan dan Emisi Karbon. Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan.
 14. Zacky, A., Supriyadi, A., R, A., Kusumawanto, A., Wicaksono, A., Maeztri, D., . . . Nugroho, W. A. (2014). Pedoman Teknis Perhitungan Baseline Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Berbasis Energi. BAPPENAS.

